

**Stategi Partai Keadilan Sejahtera pada Pemilu Legislatif 2014 di
Kota Makassar**



Skripsi

Abdul Gafur

E 11107029

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR 2014**

ABSTRAKSI

Abdul Gafur, Nim E11107029, dengan judul “Strategi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 Di Kota Makassar” di bawah bimbingan Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si sebagai pembimbing I, dan A. Ali Armunanto S.ip, M.si sebagai pembimbing II

PKS sebagai partai kader yang berideologi islam, memiliki peluang yang cukup terbuka dalam bersaing dan memenangkan pemilu di kota Makassar, oleh karena itu penulis memfokuskan untuk meneliti strategi PKS pada pemilu 2014 di kota Makassar. tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mencari tahu strategi PKS pada pemilihan umum di kota Makassar.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis. Data dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dan literatur literatur serta artikel yang berhubungan dengan penelitian.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi PKS, kita harus melihat kekuatan dan strategi yang dimiliki PKS. Kekuatan utama PKS untuk memenangkan pemilu tahun 2014 di kota Makassar adalah militansi dan loyalitas kader, infrastruktur partai serta pihak-pihak eksternal dari PKS yaitu para relawan partai yang bekerja untuk memenangkan partai. PKS melakukan pendekatan terhadap masyarakat dengan cara meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, baik pada pelayanan social, pelayanan pendidikan maupun pelayanan pada sisi keagamaan dan ideology islamnya. Adapun yang menjadi tantangan bagi PKS pada pemilu tahun 2014 adalah kurangnya peran pemerintah terhadap keberadaan partai politik utamanya pada sisi financial partai, perilaku pemilih di kota Makassar yang masih pragmatis dan kompetisi partai yang semakin ketat pada pemilu tahun 2014 di kota Makassar.

Kata Kunci : Strategi Politik

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum warhamatullahi Wabarakatuh

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Indonesia sebagai Negara yang menganut sistem demokrasi modern, memiliki banyak sekali partai politik mulai dari awal kemerdekaan hingga saat ini, sehingga wajar jika Indonesia menjadi salah satu Negara yang menerapkan sistem Multi Partai. Dari sekian banyak partai yang lahir di Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah salah satu partai besar yang berideologi islam yang patut diperhitungkan karena memiliki *track record* yang cukup baik dan selalu meningkat pada setiap perhelatan pemilu di Indonesia. Melihat fenomena ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Strategi Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Di Kota Makassar**”.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua Orang Tua dan Keluarga penulis, Ayahanda dan Ibunda serta Saudara-saudariku yang selama ini tidak pernah berhenti untuk memberikan do'a, support, kepercayaan, nasehat-nasehat, serta kasih sayangnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada seluruh keluarga besar, kapada Om, Tante dan Sepupu-sepuku yang selalu mendukung dan membantu penulis dalam melakukan penelitian, mulai dari pengumpulan data hingga selesainya skripsi ini.

Skripsi ini tidak akan dapat penulis rampungkan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Sadar akan hal ini maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
3. Dr. Gustiana A. Kambo M.Si selaku Pemimbing I dan A. Ali Armunanto S.Ip., M.Si selaku pembimbing II, terima kasih atas waktu, tenaga, dan arahan yang telah diberikan selama ini
4. Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik FISIP UNHAS, terima kasih atas masukan yang telah diberikan selama ini
5. H. A. Gau Kadir, MA selaku ketua dan A. Naharuddin S.Ip., M.Si selaku Sekertaris jurusan Politik Pemerintahan FISIP UNHAS
6. Dosen Program Studi Ilmu Politik yang telah banyak membagi ilmu dan pengalaman-pengalaman kepada penulis, terima kasih Banyak juga Staf Pegawai di Jurusan Politik Pemerintahan dan di lingkungan FISIP serta lingkungan Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu.
7. KRITIS 07 (Komunitas Riset Intelektual Politis)
8. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Fisip Unhas
9. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada informan-informan yang telah membantu dalam memberikan data-data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan Bapak/Ibu/Saudara (i). Semoga segala yang telah dilakukan dapat bernilai ibadah di sisiNya. Amin Wabillahi Taufiq Wal Hidayah, Wassalamu Alaikum Warahmatullahi

Wabarakatuh

Makassar, 23 Oktober 2014

HALAMAN PENGESAHAN

” Strategi Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilu Legislatif 2014
di Kota Makassar”

Nama Mahasiswa : Abdul Gafur

Nomor Pokok : E 111 07 029

Jurusan : Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan

Program Studi : Ilmu Politik

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Ilmu
Politik pada program studi Ilmu Politik, jurusan Politik Pemerintahan

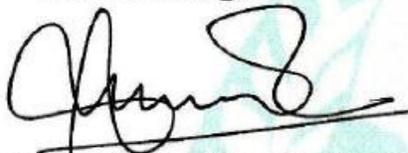
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin

Makassar, Oktober 2014

Menyetujui,

Pembimbing I



Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si
NIP: 19651109199103 1 008

Pembimbing II



Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si
NIP: 19730813 199803 2 001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Politik dan
Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin



Dr. H. Gau Kadir, MA
NIP: 19501017 198003 1 002

Ketua Program Studi
Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Hasanuddin



Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si
NIP: 19730813 199803 2 001

HALAMAN PENGESAHAN

” Strategi Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilu Legislatif 2014 di Kota Makassar”

Nama Mahasiswa : Abdul Gafur

Nomor Pokok : E 111 07 029

Jurusan : Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan

Program Studi : Ilmu Politik

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Ilmu Politik pada program studi Ilmu Politik, jurusan Politik Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin

Makassar, Oktober 2014

Panitia Ujian Sarjana

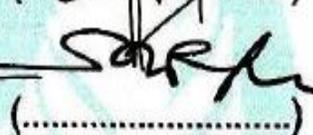
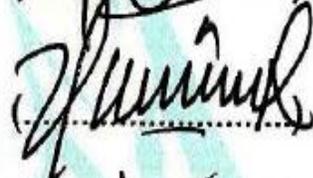
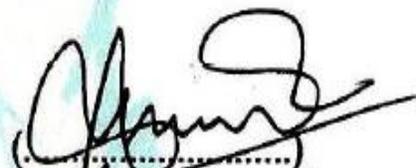
Ketua : Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si

Sekretaris : A. Ali Amunanto, S.IP, M.Si

Anggota : Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP, M.Si

Andi Naharuddin, S.IP, M.Si

Drs. H. A. Ya'kub, M.Si



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan salah satu ciri dari sistem politik demokrasi. Pemilihan umum dan institusi legislatif yang dihasilkannya merupakan penghubung yang sah antara rakyat dan pemerintah dalam suatu masyarakat demokrasi, sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan bagi rakyat. Keberadaan. Pemilihan umum menjadi mekanisme politik untuk melakukan rekrutmen dan seleksi orang-orang yang akan duduk dalam lembaga perwakilan. Aspek dinamis dari penyelenggaraan pemilihan umum yang berlangsung secara demokratis, dalam arti langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan kompetitif, akan menentukan sifat perwakilan politik tersebut.

Sistem pemilu di Indonesia perlahan berkembang kearah yang lebih Demokratis sejak reformasi tahun 1998. Pemilu 2004 merupakan pemilu legislatif pertama yang diadakan secara langsung. Ini mengindikasikan bahwa rakyat telah lebih banyak dilibatkan dalam proses politik. Trend ini berlanjut hingga tahun 2009 diadakannya Pemilu legislatif hanya yang berbeda jika pemilu legislative 2004 berdasarkan nomor urut, pada pemilu legislatif 2009 berdasarkan suara terbanyak. Dalam proses Pemilu legislatif tahun 2009 lalu ada fenomena-fenomena yang berhubungan dengan pesta demokrasi ini yang menarik untuk diperbincangkan. Terutama yang menyangkut kompetisi antar partai politik dalam upaya untuk memperoleh eksistensi.

Partai politik hadir ditengah-tengah masyarakat bertujuan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Cara yang digunakan oleh suatu partai politik dalam

sistem demokrasi untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah ikut serta dalam pemilihan umum¹. Partai politik agar memperoleh eksistensi dalam sistem politik, partai politik harus bersaing dalam pemilihan umum untuk memperoleh suara dari masyarakat dan mendapat kursi di parlemen.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sebelumnya bernama Partai Keadilan (PK), adalah sebuah [partai politik](#) berbasis [Islam](#) di [Indonesia](#). PKS didirikan di [Jakarta](#) pada [20 April 2002](#) dan merupakan kelanjutan dari [Partai Keadilan](#) (PK) yang didirikan di [Jakarta](#) pada [20 Juli 1998](#).² Akibat [UU Pemilu Nomor 3 Tahun 1999](#) tentang syarat berlakunya batas minimum keikutsertaan parpol pada pemilu selanjutnya (*electoral threshold*) dua persen, maka PK harus mengubah namanya untuk dapat ikut kembali di Pemilu berikutnya. Pada [2 Juli 2003](#), Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera) menyelesaikan seluruh proses [verifikasi](#) Departemen Kehakiman dan HAM (Depkehham) di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (setingkat Propinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (setingkat Kabupaten/Kota). Sehari kemudian, PK bergabung dengan PKS dan dengan penggabungan ini, seluruh hak milik PK menjadi milik PKS, termasuk anggota dewan dan para kadernya. Dengan penggabungan ini maka PK (Partai Keadilan) resmi berubah nama menjadi PKS (Partai Keadilan Sejahtera).

Realitas yang dihadapi pada peningkatan jumlah perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera di kota Makassar yang merupakan basis massa Partai Golkar adalah sebuah kejadian fenomenal. Hal ini kemudian mengindikasikan keberhasilan Partai Keadilan Sejahtera dari partai yang lahir pada era reformasi ini dalam melakukan

¹ Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, (PT. Grasindo. Jakarta, 2010) hal.149

² http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Keadilan_Sejahtera diakses pada 10 Februari 2012

berbagai terobosan-terobosan baru dan berbeda dari partai politik lainnya untuk menarik simpati dan dukungan dari masyarakat Kota Makassar. Pada pemilu legislatif 2009 di Kota Makassar memperoleh 31.742 suara dengan persentase 5,98% dan mendapat 5 kursi di DPRD.³ Partai Keadilan Sejahtera Kota Makassar dalam memperoleh suara senantiasa melakukan koordinasi dengan seluruh pengurus baik di tingkat pusat, daerah, cabang maupun ranting. Koordinasi yang baik antara Partai dan caleg itu sendiri juga terus dibangun secara intensif.

“...meskipun namanya adalah suara terbanyak, tetapi caleg tidak bisa melepaskan diri dari partai, sebab yang memiliki kursi di parlemen adalah partai dan bukan caleg. Dan kemudian, perolehan suara caleg ini sangat ditentukan oleh pencitraan dan kinerja partai yang yang mengusung caleg tersebut. Oleh sebab itu diperlukan suatu koordinasi dan kerjasama secara simultan antara partai sebagai pemegang kursi dan caleg sebagai politisi yang akan menduduki kursi tersebut.”⁴

Pada pemilu legislatif tahun 2009 Partai Keadilan Sejahtera mengalami peningkatan perolehan suara yang signifikan. Demikian halnya yang terjadi di kota Makassar, pada pemilu legislatif 2004 keberadaan Keadilan Sejahtera tidaklah terlalu diperhitungkan tetapi pada pemilu legislatif 2009 Keadilan Sejahtera memperoleh suara yang bersaing dan memperoleh eksistensinya dalam kancah perpolitikan di kota Makassar. Hal ini mengindikasikan Keadilan Sejahtera menerapkan suatu strategi politik untuk memperoleh eksistensi secara tepat sasaran sehingga Partai Keadilan Sejahtera dapat memperoleh suara dan mampu bersaing pada pemilu legislatif 2014 lalu. Meningkatnya perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera di Kota Makassar yang sangat signifikan dan merata di hampir seluruh dapil yang ada, didukung oleh kinerja

³ Data KPU Kota Makassar. Pemilu legislatif 2009

⁴ Wawancara dengan Drs. Muh Sabir, Kepala Kabag Umum KPU Kota Makassar 13 Februari 2012 di KPU Kota Makassar, Pukul 10.30 Wita

pemimpin politik, manajer kampanye dan aktivis/tim relawan sampai pada saksi-saksi yang beroperasi pada saat pemilu.

B. Rumusan Masalah

Memperhatikan luasnya cakupan masalah yang akan diteliti mengenai **”Strategi Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilu Legislatif 2014 di Kota Makassar”**, maka penulis membatasinya pada persoalan sebagai berikut :

Bagaimana strategi politik yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera untuk mendapat kursi pada pemilu legislatif 2014 di Kota Makassar ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian :

- a. Mendeskripsikan strategi politik Partai Keadilan Sejahtera dalam mobilisasi pemilih pada pemilu legislatif 2014 di Kota Makassar.
- b. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor faktor yang menjadi kendala Partai Keadilan Sejahtera pada pemilu legislatif 2014 di Kota Makassar.

2. Manfaat Penelitian

2.1 Manfaat Teoritis :

- a. Menunjukkan secara ilmiah mengenai strategi dan kendala politik Partai Keadilan Sejahtera dalam mobilisasi pemilih pada pemilu legislatif 2014 di Kota Makassar.
- b. Dalam wilayah akademis, memperkaya khasanah kajian ilmu politik untuk pengembangan keilmuan, khususnya politik kontemporer.

1.2 Manfaat Praktis :

- a. Memberikan bahan rujukan kepada masyarakat yang berminat dalam memahami realitas partai politik dan pemilu.
- b. Memberikan informasi tentang strategi politik Partai Keadilan Sejahtera pada pemilu legislatif 2014 di Kota Makassar.
- c. Sebagai salah satu prasyarat memperoleh gelar sarjana ilmu politik.

BAB II

Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini yang akan dibahas ada empat aspek yaitu: Partai Politik, Strategi Politik, Mobilisasi, dan Pemilu Legislatif keempatnya akan diuraikan lebih lanjut.

A. Partai Politik

Sejarah keberadaan partai politik di Indonesia dimulai ketika Belanda mencanangkan politik etis pada tahun 1912 dan berdiri organisasi kemasyarakatan yang merupakan pelopor berdirinya partai politik di Indonesia yaitu Boedi Utomo. Partai politik merupakan sarana bagi warga Negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan Negara. Dimana partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota - anggotanya mempunyai orientasi, nilai - nilai, dan cita - cita yang sama.⁵ Partai politik adalah unsur penting dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Partai politik menghubungkan masyarakat madani dengan negara dan lembaga-lembaganya. Selain itu, partai menyuarakan pandangan serta kepentingan berbagai kalangan masyarakat.

Menurut UU No.2 Tahun 2011 Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita - cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶

⁵ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama 2006) Hal.160

⁶ Pasal 1, ayat 1 UU No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik.

Partai politik dapat berarti organisasi yang mempunyai basis ideologi yang jelas, dimana setiap anggotanya mempunyai pandangan yang sama dan bertujuan untuk merebut kekuasaan atau mempengaruhi kebijaksanaan negara baik secara langsung maupun tidak langsung serta ikut pada sebuah mekanisme pemilihan umum untuk bersaing secara kompetitif guna mendapatkan eksistensi

Carl J. Friedrich mendefinisikan partai politik “sekelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini kemanfaatan yang bersifat idiiil maupun materil kepada anggotanya”.⁷ Sedangkan menurut *Giovanni Sartori*, partai politik adalah “ suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum itu mampu menempatkan calonnya untuk menduduki jabatan – jabatan.”⁸ Menurut Ichlasul Amal partai politik merupakan satu keharusan dalam kehidupan politik yang modern dan demokratis⁹. Partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan secara absah (*legitimate*) dan damai

Dari beberapa pengertian di atas maka penulis berusaha menggambarkan kembali bahwa partai politik, sesungguhnya adalah kumpulan dari beberapa orang yang mempunyai orientasi sama yang terbentuk dalam suatu wadah lembaga formal berdasar kepada ketentuan konstitusi kelembagaan dan mengikuti sistem politik dan sistem pemilihan yang ada.

⁷ Miriam Budiarjo, Op.CitHal.161

⁸ [Http://id.Wikipedia.Org/Wiki/Politik](http://id.Wikipedia.Org/Wiki/Politik) diakses padatangga 10-02-2012

⁹ Ichlasul Amal, *Teori-Teori Mutakhir Partai*, (PT. Tiara Wacana. Yogyakarta, 1998) hal. 11

Secara hakiki partai politik memiliki fungsi utama yaitu mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Selain fungsi di atas, partai politik juga memiliki fungsi antara lain :¹⁰

a. Sebagai Sarana Komunikasi Politik

Dalam menjalankan fungsi sebagai sarana komunikasi politik, partai politik mempunyai peran penting sebagai penghubung antara yang memerintah dan yang diperintah. Menurut Sigmund Neumann dalam hubungannya dengan komunikasi politik, partai politik merupakan perantara besar yang menghubungkan kekuatan – kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi dan mengaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas.¹¹

Dalam melaksanakan fungsi ini partai politik tidak menyampaikan begitu saja segala informasi dari pemerintah kepada masyarakat atau dari masyarakat kepada pemerintah, tetapi merumuskan sedemikian rupa sehingga penerima informasi dapat dengan mudah memahami dan memanfaatkan. Segala kebijakan pemerintah yang biasanya dirumuskan dalam bahasa teknis dapat diterjemahkan dalam bahasa yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Sebaliknya segala aspirasi, keluhan, dan tuntutan masyarakat yang biasanya tidak terumuskan dalam bahasa teknis dapat diterjemahkan oleh partai politik ke dalam bahasa yang dapat dipahami oleh

¹⁰ Miriam Budiardjo, Pengantar Ilmu Politik, (Gramedia, Jakarta, 2000)hal. 163-164.

¹¹ [Http://Bimaaryasugiarto.Blogspot.Com/2008/03/Partai-Politik-Dan-Prospek.Html](http://Bimaaryasugiarto.Blogspot.Com/2008/03/Partai-Politik-Dan-Prospek.Html) diakses pada tanggal 10-02-2012

pemerintah. Jadi proses komunikasi politik antara pemerintah dan masyarakat dapat berlangsung secara efektif melalui partai politik

b. Sebagai Sarana Sosialisai Politik

Fungsi sosialisai politik partai adalah upaya menciptakan citra (*image*) bahwa partai politik memperjuangkan kepentingan umum dan lebih tinggi nilainya apabila mampu mendidik anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga Negara dan menempatkan kepentingan sendiri dibawah kepentingan nasional.

Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Proses ini berlangsung seumur hidup yang diperoleh secara sengaja melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal maupun secara tidak sengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan masyarakat. Melalui proses ini masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai sarana sosialisasi politik, seperti sekolah, partai politik, dan pemerintah. Partai politik dalam sistem politik dapat menyelenggarakan proses sosialisasi politik pada masyarakat.

c. Sebagai Sarana Rekrutmen Politik

Fungsi partai politik ini yakni seleksi kepemimpinan dan kader – kader yang berkualitas. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon – calon kader.

d. Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut menentukan pelaksana pemerintahan. Dalam hal ini, partai politik memiliki fungsi untuk membuka kesempatan, mendorong, dan mengajak para anggota masyarakat yang lain untuk menggunakan partai politik sebagai saluran kegiatan mempengaruhi proses politik. Partai politik merupakan wadah partisipasi politik. Fungsi ini lebih tinggi posisinya dalam sistem politik demokrasi dari pada dalam sistem politik totaliter karena dalam sistem politik demokrasi mengharapkan ketaatan dari para warga dari pada aktivitas mandiri.

e. Sebagai Sarana pengatur Konflik

Potensi konflik selalu ada di setiap masyarakat. Negara Indonesia yang bersifat heterogen yang terdiri dari etnis, agama, dan lain – lain. Perbedaan tersebut dapat menyebabkan konflik. Maka partai politik melaksanakan fungsi sebagai pengatur konflik.

Partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi berfungsi untuk mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung, dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan pada musyawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik. Untuk mencapai penyelesaian berupa keputusan itu diperlukan kesediaan berkompromi diantara para wakil rakyat, yang berasal dari partai-partai politik.

Setiap manusia pasti punya tujuan hidup, begitu juga halnya dengan partai politik. Adapun tujuan umum partai politik di Indonesia sebagai berikut :

- (1) Mewujudkan cita – cita nasional bangsa Indonesia, sebagai termaksud dalam pembukaan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
- (2) Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.¹²

Tujuan khusus partai politik adalah memperjuangkan cita – citanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diwujudkan secara konstitusional. Perlu diterangkan bahwa partai berbeda dengan gerakan (*movement*). Suatu gerakan merupakan kelompok atau golongan yang ingin mengadakan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga politik atau kadang-kadang malahan ingin menciptakan suatu tata masyarakat yang baru sama sekali, dengan memakai cara-cara politik. Dibanding dengan partai politik, gerakan mempunyai tujuan yang lebih terbatas dan fundamental sifatnya dan kadang-kadang malahan bersifat ideologi. Orientasi ini merupakan ikatan yang kuat di antara anggota-anggotanya dan dapat menumbuhkan suatu identitas kelompok (*group identity*) yang kuat. Organisasinya kurang ketat dibanding dengan partai politik. Berbeda dengan partai politik, gerakan sering tidak mengadakan nasib dalam pemilihan umum.

Partai politik juga berbeda dengan kelompok penekan (*pressure group*) atau istilah yang lebih banyak dipakai dewasa ini, kelompok kepentingan (*interest group*).

¹² Indra Bastian, *Akutansi Untuk LSM dan Partai Politik*. (Jakarta.Erlangga.2007) Hal.154

Partai politik bertujuan memperjuangkan suatu kepentingan dalam skala yang luas melalui mekanisme pemilu, sedangkan kelompok penekan atau kelompok kepentingan yang lain seperti kelompok profesi, kelompok adat, organisasi kemasyarakatan hanya mengejar kepentingan-kepentingan sesaat dalam ruang lingkup yang lebih kecil serta melewati mekanisme politik formal seperti pemilu.

B. Pendekatan Institusional Partai

Pendekatan Institusional partai memandang partai politik sebagai lembaga yang memiliki struktur dan fungsi untuk mencapai tujuan.¹³ Teori kelembagaan (Institusional), yang menyatakan bahwa partai politik dibentuk oleh lembaga-lembaga negara baik legislatif maupun eksekutif sebagai kebutuhan para anggotanya untuk mengadakan kontak dan membina dukungan dengan masyarakat. Hal ini dilakukan agar kebijakan-kebijakan yang dihasilkan tidak bias dengan kebutuhan, tuntutan, dan harapan publiknya. Oleh karena itu, dibuatlah wadah yang mampu menampung aspirasi warga masyarakat yang kemudian dikenal dengan istilah partai politik. Partai politik adalah organisasi yang mempunyai fungsi sebagai penyalur artikulasi dan agregasi kepentingan publik yang paling mapan dalam sebuah sistem politik modern. Secara sederhana partai politik merupakan *representation of ideas*¹⁴ yang harus ada dalam kehidupan politik modern yang demokrasi. Partai politik sebagai suatu organisasi yang berorientasi pada *representation of ideas* secara ideal dimaksudkan untuk mewakili kepentingan-kepentingan warga, memberikan jalan kompromi bagi pendapat/tuntutan

¹³ Arifin Rahman. *Sistem Politik Indonesia (LPM IKIP: Surabaya.1998)*

¹⁴ Robert Michels, *Partai Politik: Kecenderungan Oligarkis dalam Birokrasi*, Penerbit Rajawali, Jakarta, 1984, hal.23.

yang saling bersaing, serta menyediakan ruang bagi suksesi kepemimpinan politik secara damai dan legitimasi. Karena itu, menurut Roger Soltau:

*"partai politik adalah sekelompok warga negara yang terorganisir yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan menguasai pemerintahan dan melakukan kebijakan mereka sendiri."*¹⁵

Sehingga partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi-ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi dan yang mengkaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas. Partai politik salah satu pilar dan institusi demokrasi yang penting dalam membangun politik yang lebih berkualitas dan beradab. Partai politik dengan berbagai peran dan fungsinya diupayakan mampu meredam (bahkan menyelesaikan) berbagai persoalan yang muncul dalam masyarakat modern saat sekarang ini. Karena itu, tidak keliru apabila Samuel P. Huntington pernah mengutarakan bahwa:

*"partai partai yang kuat dan terinstitusionalisasi akan menjanjikan terbangunnya sistem demokrasi yang lebih baik."*¹⁶

Untuk menjamin kemampuannya memobilisasi dan menyalurkan aspirasi konstituen itu, struktur organisasi partai politik yang bersangkutan haruslah disusun sedemikian rupa, sehingga ragam kepentingan dalam masyarakat dapat ditampung dan diakomodasikan seluas mungkin. Karena itu, struktur internal partai politik penting untuk disusun secara tepat. Di satu pihak ia harus sesuai dengan kebutuhan untuk mobilisasi dukungan dan penyaluran aspirasi konstituen. Di pihak lain, struktur organisasi partai

¹⁵ Ichlasul Amal, *Teori-Teori Mutakhir Partai*, (PT. Tiara Wacana. Yogyakarta, 1998) hal. 12

¹⁶ *Ibid.*13

politik juga harus disesuaikan dengan format organisasi pemerintahan yang diidealkan menurut visi partai politik yang dimintakan kepada konstituen untuk memberikan dukungan mereka. Semakin cocok struktur internal organisasi partai itu dengan kebutuhan, makin tinggi pula derajat pelembagaan organisasi yang bersangkutan.,.

Bukanlah usaha yang mudah untuk melakukan pengembangan kelembagaan partai politik pada masa transisional, setidaknya itu yang diuraikan oleh Larry Diamond dan Richard Gunther dalam bukunya *Political Parties and Democracy*¹⁷. Ada seperangkat cara yang perlu dilakukan oleh partai untuk melembagakan dirinya sendiri agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan peran dan fungsi yang sejatinya. Sedikitnya terdapat lima bidang yang perlu diperhitungkan manakala pelembagaan pengembangan partai politik hendaknya dikedepankan, yaitu :

Pertama, keutuhan internal. suatu keutuhan partai dapat dilihat dari ada tidaknya pembelahan dalam partai (*faksionalisme internal*). Adanya dialog dalam partai memang prasyarat penting bagi tumbuhnya wacana yang sehat, namun tumbuhnya perdebatan bahkan lahirnya faksionalisme-dalam partai akan dapat merugikan pengembangan partai politik ke depan. Karena itu, ada beberapa catatan penting guna menumbuhkan keutuhan internal partai (1) mendorong dialog demokrasi di dalam tubuh partai, (2) meresapi berbagai prinsip dan kebijakan internal partai, dan (3) memiliki mekanisme yang menjamin berlakunya proses dan prosedur yang benar ketika muncul pertikaian.

Kedua, ketangguhan organisasi. partai politik memiliki tujuan dan kepentingan untuk meraih konstituen guna pembangunan legitimasi politik dirinya Tujuan tersebut

¹⁷ Pengertian dan asal usul partai. <http://www.scribd.com/doc/49993569/Parpol-Pengertian-Dan-Asal-usul>

dapat tercapai apabila partai politik berhasil menyebarkan sumber daya-sumberdaya ke level-level yang lebih rendah daripada di tingkat Pusat/nasional. Hal ini menunjukkan bahwa ketangguhan partai politik di semua level administrasi pemerintahan perlu dibangun sedemikian rupa, sehingga sumber-sumber daya (manusia, finansial, serta metode) dapat bekerja demi kepentingan dan tujuan partai politik dalam jangka pendek dan jangka panjang. Mewujudkan nilai-nilai demokratis yang aktual dan permanen dalam partai politik sangatlah berguna bagi institusionalisasi dan perkembangan partai.

Ketiga, identitas politik partai. Identitas partai menjadi penting ketika ia berupaya untuk mengejar jabatan di pemerintahan. Karena itu gagasan yang jelas dan konstruktif, prinsip-prinsip yang berorientasi publik, pelibatan anggota partai, serta program-program yang matang menjadi citra yang perlu dibangun dalam mengonstruksi identitas partai yang kuat. Dukungan suara pada partai politik memerlukan strategi yang jitu dan konkret. Dan, salah satu jalan yang paling jitu dalam meraup dukungan pemilih adalah melalui mekanisme kampanye. Guna memaksimalkan perolehan dukungan dari para votels, partai politik harus mengorganisasi sumber daya-sumber daya internal partai. Untuk tujuan itu, partai politik harus memiliki gagasan yang jelas mengenai realisasi kebutuhan pemilih.

Terkait dengan hal terakhir, seperti yang dibahas di atas, lebih khusus lagi, dalam rangka mendekati konstituen dengan partai politik dukungannya, maka perlu ada metode dan strategi yang dibentuk guna keperluan itu. Setidaknya ada empat aktivitas yang dapat dilakukan, pertama, melakukan pendidikan dan pemberdayaan warga. Pendidikan politik, melalui *civil education* (pendidikan warga), *voter education* (pendidikan pemilih), dialog terbuka.

C. Strategi Politik

Strategi berasal dari bahasa Yunani yang berarti *stratēgos*¹⁸ yang diartikan sebagai keseluruhan tindakan-tindakan yang ditempuh oleh sebuah organisasi untuk mencapai sasaran dan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan dibutuhkan pengambilan keputusan strategis. Menurut Hunger strategi adalah rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana organisasi mencapai misi dan tujuannya.¹⁹

Dalam kamus Longman Dictionary of Contemporary English, arti dari strategi adalah *strategy is a particular plan for winning success in particular activity, as in war, a game, a competition, or for personal advantage.*²⁰ Jadi, strategi merupakan perencanaan dalam mensukseskan tujuan dalam segala aktifitas. Baik dalam mensukseskan peperangan, kompetisi maupun yang lainnya. Kemudian, seiring dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dibidang manajemen, kata strategi yang biasa di gunakan organisasi profit dan non profit, sering digabungkan dengan perencanaan strategi maupun manajemen strategi. Perencanaan strategi dimaknai rancangan yang bersifat sistemik dilingkungan sebuah organisasi. Sedangkan manajemen strategi mempunyai definisi yang berbeda-beda. *Proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya, yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi untuk mencapai*

¹⁸ wikipedia

¹⁹ Arbi Sanit, *Perwakilan Politik di Indonesia*, (Jakarta : CV. Rajawali, 1985) hal 13

²⁰ Kamus Longman *Dictionary of Contemporary English*, The Pitman Press, Bath, Great Britain, 1982

tujuannya.²¹ Arus keputusan dan tindakan yang mengarah pada pengembangan suatu strategi atau strategi-strategi yang bersifat efektif untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Sedangkan menurut Michael Allison dan Jude Kaye, Strategi adalah proses sistemik yang disepakati organisasi dan membangun keterlibatan diantara *stakeholder* utama-tentang prioritas yang hakiki bagi misinya dan tanggap terhadap lingkungan operasi.²²

Jadi, strategi politik adalah sebuah rencana yang sistematis dan mengimplementasikannya dalam mencapai tujuan memenangkan dalam bidang politik. Dengan strategi politik inilah partai politik mampu memenangkan dalam setiap momentum perebutan kekuasaan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa aktivitas politik setidaknya harus mengandung empat hal yakni, (1) ditujukan untuk menciptakan efek atau dampak tertentu (2) ditujukan kepada jumlah khalayak sasaran yang besar (3) dipusatkan dalam kurun waktu tertentu, dan (4) dilakukan melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisasi.

Strategi dalam pengertian sempit maupun luas terdiri dari tiga unsur, yaitu tujuan (*ends*), sarana (*means*), dan cara (*ways*). Dengan demikian strategi adalah cara yang digunakan dengan menggunakan sarana yang tersedia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan²³. Tujuan akhir dalam strategi politik adalah untuk membawa calon

²¹ Hadari Nawawi, *Manajemen Strategi Organisasi non Profit Bidang Pemerintahan dengan Ilustrasi di Bidang Pendidikan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2005), hal.148

²² Michael Allison, dan Jude Kaye, *Perencanaan Strategis bagi Organisasi Nirlaba*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia) , hal. 1

²³ Nasution, Noviantika. *Bobolnya Kandang Banteng: Sebuah Otokritik*. Jakarta: Penerbit Suara Bebas. 2006. Hal. 43

kepala daerah yang didukung oleh strategi politiknya menduduki jabatan kepala daerah yang diperebutkan melalui mekanisme pemilihan secara langsung oleh masyarakat.

Strategi politik pada hakekatnya adalah tindakan yang bersifat *goal oriented*. Pada kegiatan strategi politik selalu ada tujuan yang hendak dicapai. Pencapaian tujuan tersebut tentu saja tidak dapat dilakukan melalui tindakan yang seadanya, melainkan harus didasari pengorganisasian tindakan secara sistematis dan strategis. Hal senada juga diungkapkan oleh Nursal yakni : “Pada dasarnya political marketing adalah serangkaian aktivitas terencana, strategis tapi juga taktis, berdimensi jangka panjang dan jangka pendek, untuk menyebarkan makna politik kepada para pemilih. Tujuannya adalah untuk membentuk dan menanamkan harapan, sikap, keyakinan, orientasi, dan perilaku pemilih. Perilaku pemilih yang diharapkan adalah ekspresi mendukung dengan berbagai dimensinya, khususnya menjatuhkan pilihan pada partai atau kandidat tertentu.”²⁴

Melihat dari penjelasan di atas partai politik disarankan untuk merencanakan strategi politik yang sistematis dan taktis agar dalam melaksanakan kegiatan komunikasi pemasaran politik dapat mencapai khalayak sasaran yang dituju.

Pada dasarnya strategi politik adalah strategi kampanye politik untuk membentuk serangkaian makna politis yang terbentuk dalam pikiran para pemilih menjadi orientasi perilaku yang akan mengarahkan pemilih untuk memilih partai politik atau konstestan tertentu. Makna inilah yang menjadi output penting strategi politik yang menentukan pihak, pihak mana yang akan dicoblos para pemilih.²⁵ Pembentukan makna-makna

²⁴ Adman Nursal, *Political Marketing: Strategi memenangkan pemilu, sebuah pendekatan baru kampanye pemilihan DPR, DPD, Presiden*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm.23.

²⁵ Ibid. Hal. 295-298.

politis tersebut dapat dilaksanakan melalui metode (*Party, Pass Marketing, Person, Policy, Positioning*),²⁶

1. *Party* juga dilihat sebagai substansi produk politik. Partai politik mempunyai identitas utama, asset reputasi, dan identitas estetis. Ketiga hal tersebut akan dipertimbangkan oleh para pemilih dalam menetapkan pilihannya. Dalam hal ini partai politik menguatkan intisusional secara internal melalui konsolidasi partai, lalu penguatan eksternal di masyarakat.
2. *Pass Marketing*, strategi politik yang dilakukan memasarkan produk politik untuk mengumpulkan kekuatan dari pihak pihak lain untuk bersama sama bergabung mewujudkan tujuan dari produk politik tersebut, ini biasa sering kali di kaitakan dengan koalisi partai.

Menurut Andrey Heywood, koalisi adalah penggabungan sekelompok partai politik yang berkompetisi, secara bersama-sama memiliki persepsi tentang kepentingan, atau dalam menghadapi ancaman, serta dalam penggalangan energi secara kolektif.²⁷

3. *Person* adalah kandidat legislatif atau eksekutif yang akan dipilih melalui Pemilu. Kualitas person dapat dilihat nelalui tiga dimensi, yakni kualitas instrumental, dimensi simbolis, dan fenotipe optis.
4. *Policy* adalah tawaran program kerja jika terpilih kelak. Policy yang efektif harus memenuhi tiga syarat, yakni meraik perhatian, mudah terserap pemilih, attributable. Ini substansi produk politik disajikan. Presentasi sangat penting karena dapat mempengaruhi makna pemilih. Presentasi disajikan dengan

²⁶ Oman Heryaman, S.IP, M.Si, Political Marketing Dan Kualitas Demokrasi, <http://www.scribd.com/doc/5988402/Political-Marketing-dan-Kualitas-Demokrasi>

²⁷ Andrey Heywood dalam buku Afan Gaffar, 1999. Politik Indonesia: *Transisi Menuju Demokrasi*. Pustaka Pelajar.

medium presentasi. Produk politik disampaikan kepada pasar politik, baik penyampaian produk langsung kepada masyarakat maupun penyampaian produk melalui pemanfaatan media massa.

5. *Positioning* adalah strategi komunikasi untuk memasuki jendela otak pemilih agar konstestan mengandung arti tertentu yang mencerminkan keunggulannya terhadap konstestan pesaing dalam bentuk hubungan asosiatif.

Metode diatas, biasa disebut dengan *Totally political marketing* yakni²⁸ partai politik memasarkan semua yang bisa dijual, baik potensi, kelebihan dan performa partai politik. Di dalam kajian ini, usaha-usaha tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu metode dalam melakukan mobilisasi.

Semua unit dalam sistem kinerja partai politik layak dan harus dijual. Antara lain yang sering dilupakan orang misalnya kinerja institusi partai politik rapi tidak konflik negatif, anggota dan perilakunya, kinerja kandidat terpilih dalam Pemilu sebelumnya, dan lainnya yang memiliki citra positif. Jadi praktisi *Political Marketing* yang canggih tidak hanya memfokuskan diri pada penggarapan isu dan program kerja saja, meskipun program kerja itu penting *Totally Political Marketing* juga diartikan apabila partai politik mampu dan harus menarik. Pengertian melaksanakan dua model kampanye sekaligus secara konsisten dan berkesinambungan (*continuity*), yaitu kampanye Pemilu dan Kampanye Politik.

Dalam kampanye pemilu maupun kampanye politik, marketing politik adalah sebuah proses. Proses tersebut harus ditempuh melalui dua hal utama, yaitu marketing.

Marketing program adalah menyampaikan produk politik yang disebut dengan 4P

²⁸ Oman Heryaman, "Memenangkan Pemilu dengan Political Marketing", makalah Orientasi Pemenangan Pemilu DPD PKS Kabupaten Bandung, 2007 dalam [http://digilib.unpas.ac.id/program dan voters segmentation](http://digilib.unpas.ac.id/program%20dan%20voters%20segmentation)

(*Product, Price, Promotion dan Place*). *Voters segmentation* adalah menentukan para pemilih pada beberapa level kategori, sehingga pengemasan produk politik dapat dilakukan sesuai kategori tersebut.

Bagi partai-partai politik maupun kandidat, sekurang-kurangnya konsep marketing politik dapat dilakukan melalui beberapa metode: Mengkomunikasikan pesan dan gagasan. Mengembangkan identitas jati diri, kredibilitas dan transparansi. Interaksi dan respons dengan komunitas internal dan eksternal dengan melakukan pencitraan partai politik. Menyediakan pelatihan, mengolah dan menganalisis data untuk kepentingan kampanye. Secara terus menerus mempengaruhi dan mendorong komunitas untuk mendukung partai politik.

Kampanye sebagai salah satu bentuk marketing politik, dapat diterapkan dalam 2 model. Pertama, kampanye pemilu yang bersifat jangka pendek dan biasanya dilakukan menjelang Pemilu. Kedua, kampanye politik yang bersifat jangka panjang dan dilakukan secara terus menerus. Pendapat ini didukung Fritzs Plasser dan Gunda Plasser,²⁹ yang menyatakan telah terjadi pergeseran dalam bentuk kampanye dewasa ini, dari model kampanye modern ke mode kampanye pasca modern. Kampanye modern menggunakan "logika media" dan menempatkan pemilih sebagai audiens, sedangkan kampanye pasca modern menerapkan logika "pemasaran" yang menempatkan masyarakat sebagai konsumen.

Strategi politik tepat diterapkan dalam model kampanye politik yang bertujuan memobilisasi. Melalui logika pemasaran, kedekatan partai politik dengan konstituen dan massa mengambang tetap terjaga setiap saat. Tercipta pendidikan politik masyarakat

²⁹ Fritzs Plasser dan Gunda Plasser, *Global Political Campaigning: A Worldwide Analysis of Campaign Professionals and Their Practices*. Greenwood Pub Group, 2002

dengan menempatkan masyarakat sebagai subyek politik. Bukan sekedar sebagai obyek politik yang terjadi pada saat hingar bingar kampanye Pemilu saja, dimana setelah itu terputus hubungan antara masyarakat dan partai politik yang dapat menyebabkan antipati dan apolitis masyarakat terhadap politik.

Hal diatas antara lain disebabkan oleh dua hal³⁰. Pertama, intensitas interaksi partai politik dan masyarakat seringkali hanya terjadi pada waktu menjelang Pemilu melalui pelaksanaan kampanye. Pada masa ini partai-partai berlomba menawarkan produk-produk politik berupa ideologi, gagasan, kebijakan dan rekam jejak. Masyarakat dijadikan 'pasar sesaat (pasar kaget)' untuk mendengar, melihat dan memilih dari produk-produk mereka. Di luar masa ini, komunikasi partai politik dengan masyarakat seperti terputus dengan kesibukannya masing-masing. Disatu sisi partai politik sibuk dengan agendanya masing-masing yang sering tidak bersentuhan dengan masyarakat, dan disisi lain masyarakat seringkali lupa dan apatis, apakah program-program yang dikampanyekan telah dilaksanakan atau belum. Masyarakat kehilangan daya kritisnya untuk mengontrol partai politik dan pemerintahan. Partai politik menempatkan strategi politik hanya pada kampanye Pemilu saja.

Kedua, dunia politik seringkali salah memaknai kata marketing. Marketing secara sempit diartikan sebatas memasarkan atau menjual. Marketing politik berarti menjual atau memasarkan produk-produk politik saja. Bagi partai politik waktu yang tepat untuk menjual dan memasarkan produk politik hanyalah waktu kampanye Pemilu. Padahal makna marketing jauh lebih kompleks ketimbang menjual atau memasarkan.

³⁰ Oman Heryaman, S.IP, M.Si, Political Marketing Dan Kualitas Demokrasi, <http://www.scribd.com/doc/5988402/Political-Marketing-dan-Kualitas-Demokrasi>

Dalam marketing juga mengandung makna *product inovation, new product research*, pengambilan keputusan, dan *resources* yang dilakukan setiap saat. Apabila hal tersebut dimaknai dengan benar maka seharusnya partai politik melakukan kampanye sepanjang masa (kampanye politik) dengan mengolah ide, gagasan dan program baru yang inovatif, riset aspirasi, kebijakan rasional yang menguntungkan masyarakat, dan melahirkan SDM dan leadership yang unggul untuk menjalankan roda pemerintahan dan kebijakan negara yang berpihak pada kemajuan dan kepentingan masyarakat.

Di dalam melakukan mobilisasi, partai atau kandidat juga dapat memanfaatkan figur. Hal ini tentunya dengan melihat kualitas figur yang coba ditampilkan, sehingga pemilih mampu menerimanya sebagai nilai politik yang akan dipilih. Ada hal utama yang melandasi pentingnya penggunaan marketing politik bagi partai-partai politik. Pertama, terjadinya pergeseran paradigma pemilih dari ideologi ke program kerja. Adanya de-ideologisasi pasca berakhirnya Perang Dingin secara global telah merubah pula cara pandang dan preferensi para pemilih partai politik. Masyarakat cenderung menggantikan ikatan-ikatan ideologis (tradisional) dengan hal-hal yang lebih pragmatis, yaitu program kerja yang ditawarkan oleh kontestan. Masyarakat cenderung melihat apa yang bisa dan apa yang ditawarkan oleh partai politik maupun kontestan dibandingkan dengan alasan- alasan ideologis yang ada dibalik satu partai politik atau kontestan. Hal ini terlihat nyata sekali dengan semakin membesarnya persentase pemilih non-partisan, yaitu para pemilih yang menunggu partai politik mana yang kiranya menawarkan solusi paling baik ketimbang yang lainnya. Partai politik macam inilah yang akan mereka pilih dalam Pemilu.

Kedua, meningkatnya pemilih non-partisan. Terdapat trend yang memperlihatkan semakin meningkatnya proporsi non-partisan dalam Pemilu. Nonpartisan adalah sekelompok masyarakat yang tidak menjadi anggota atau mengikatkan diri secara ideologis dengan partai politik tertentu. Kaum non-partisan melihat pentingnya kemampuan dan kapasitas orang atau program kerja partai politik mana yang dapat memberikan solusi atas permasalahan bangsa dan negara ketika program-program itu dikomunikasikan selama periode menjelang Pemilu.

Ketiga, meningkatnya massa mengambang (floating mass). Dengan meningkatnya jumlah pemilih non partisan maka jumlah massa mengambang semakin besar. Massa mengambang ini seringkali sangat menentukan menang tidaknya suatu partai politik dalam Pemilu. Massa mengambang adalah kelompok masyarakat yang diperebutkan oleh partai-partai dan kandidat yang bersaing dalam Pemilu. Massa mengambang ini semakin besar seiring semakin kritisnya masyarakat.

Keempat, adanya persaingan politik. Sistem multipartai yang kini banyak dianut oleh negara yang sedang meniti ke arah demokrasi ataupun baru saja melaksanakan transisi dari otoriter menuju demokrasi, ditambah dengan semakin kritisnya masyarakat dalam memilih partai politik telah menempatkan partai politik pada iklim kompetisi yang ketat untuk memperebutkan pemilih.

Melalui pertimbangan diatas, stategi politik bertujuan untuk :

- a. Menjadikan pemilih sebagai subyek dan bukan sebagai obyek politik. Dalam hal ini pemilih tidak hanya sekedar suara yang diperebutkan partai dengan berbagai tawaran produknya, tetapi pemilih ikut menentukan program dan produk-produk politik apa yang seharusnya dilakukan partai politik.

- b. Menjadikan permasalahan yang dihadapi pemilih adalah langkah awal dalam menyusun program kerja yang ditawarkan dalam kerangka masing-masing ideologi partai politik. Strategi politik tidak menjamin sebuah kemenangan, tapi menyediakan perangkat bagaimana menjaga hubungan dengan pemilih untuk membangun kepercayaan, mobilisasi, dan selanjutnya memperoleh dukungan suara.

Dalam perspektif marketing, ada hal yang menarik dalam proses pilkada, yaitu berlakunya logika pemasaran dalam dunia politik. Yang bertumpu pada lahan demokrasi, yang merupakan syarat utama adanya kebebasan dalam berkompetisi yang cukup sportif diantara para kandidat. Hermawan Kertajaya (1996) menjelaskan bahwa pada saat belum ada persaingan tidak keras, maka pemasaran belum terlalu dibutuhkan suatu perusahaan/kandidat. Pada situasi yang semakin keras, maka pemasaran menjadi suatu fungsi yang semakin penting. Pada saat persaingan sudah sangat keras, tidak dapat diprediksi, dan kacau maka pemasaran harus menjadi jiwa setiap orang di suatu perusahaan/kandidat.

D. Pemilihan Umum Legislatif secara langsung

Demokrasi, pada mulanya merupakan satu gagasan tentang pola kehidupan yang muncul sebagai reaksi terhadap kenyataan sosial politik yang tidak manusiawi di tengah-tengah masyarakat. Reaksi tersebut tentu datang dari orang-orang yang berpikir idealis dan bijaksana. Mereka terusik dan tergugah melihat adanya pengekangan dan pemerkosaan terhadap hak-hak asasi manusia. Ada tiga nilai ideal yang mendukung demokrasi sebagai satu gagasan kehidupan yaitu kemerdekaan (*freedom*), persamaan (*ekuality*), dan keadilan (*justice*). Dalam kenyataan hidup, ide

tersebut direalisasikan melalui perwujudan simbol-simbol dan hakekat dari nilai-nilai dasar demokrasi sungguh-sungguh mewakili atau diangkat dari kenyataan hidup yang sepadan dengan nilai-nilai itu sendiri³¹. Sejalan dengan makin menduniannya demokrasi, pemikiran tentang demokrasi pun semakin berkembang. Tapi pada umumnya pemikiran itu berintikan tentang kekuasaan dalam Negara. Dalam Negara demokrasi, rakyatlah yang memiliki dan mengendalikan kekuasaan dan kekuasaan itu dijalankan demi kepentingan rakyat.

Suatu pemerintahan itu dapat disebut demokratis apabila pemerintahan tersebut dapat memberikan kesempatan konstitusional yang teratur bagi persaingan damai untuk memperoleh kekuasaan politik untuk berbagai kelompok yang berbeda, tanpa menysihkan bagian penting dari penduduk manapun dengan kekerasan. Salah satu hal penting untuk memenuhi prasyarat tersebut diatas yaitu dengan melaksanakan pemilihan umum, karena tidak ada demokrasi tanpa diikuti pemilihan umum yang merupakan wujud yang paling nyata dari demokrasi. Pada hakikatnya pemilu di Negara manapun mempunyai esensi yang sama. Pemilu berarti rakyat melakukan kegiatan memilih orang atau sekelompok orang yang menjadi pemimpin rakyat atau pemimpin Negara. pemimpin yang terpilih akan menjalankan kehendak rakyat yang memilihnya.

Pemilihan umum merupakan salah satu sarana utama untuk menegakkan tatanan politik yang demokratis. Fungsinya sebagai alat menyetatkan dan menyempurnakan demokrasi. Esensinya sebagai sarana demokrasi untuk membentuk suatu sistem kekuasaan Negara yang pada dasarnya lahir dari bawah menurut

³¹ Arbi Sanit, *Perwakilan Politik Indonesia*, (CV. Rajawali. Yogyakarta.1985) hal 83

kehendak rakyat sehingga terbentuk kekuasaan Negara yang benar-benar memancarkan kebawah sebagai suatu kewibawaan sesuai dengan keinginan rakyat, oleh rakyat, menurut sistem permusyawaratan perwakilan³².

Pemilihan Umum pada hakekatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak politik rakyat pada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan kendaraan politik, partai politik kemudian hadir dan menawarkan kader-kadernya untuk mewakili hak-hak politik rakyat dalam negara. Tetapi untuk memperjuangkan hak-hak politik rakyat partai politik terlebih dahulu harus memperoleh eksistensi yang dapat dilihat dari perolehan suara dalam pemilihan umum.

Pemilihan umum adalah suatu sarana atau cara untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan, kepentingan rakyat perlu diwakali. Karena pada saat sekarang ini tidak mungkin melibatkan rakyat secara langsung dalam kegiatan tersebut mengingat jumlah penduduk sangat besar. Maka dari itu partai politik menawarkan calon-calon untuk mewakili kepentingan rakyat. Pemilihan umum merupakan saat dimana partai politik bertarung untuk memperoleh eksistensi di lembaga legislatif.

Dalam negara demokratis maka salah satu ciri utamanya adalah pemilihan umum untuk memilih partai politik yang akan mendapat kepercayaan rakyat. Pemilihan umum merupakan gambaran yang ideal bagi suatu pemerintahan yang demokratis. Menurut

³²Rusli Karim M, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia : Sebuah Potret Pasang Surut*, (CV. Rajawali. Jakarta.1991) hal. 120

Seymour Martin Lipset demokrasi yang stabil membutuhkan konflik atau pemisahan sehingga akan terjadi perebutan jabatan politik, oposisi terhadap partai yang berkuasa dan pergantian partai-partai berkuasa³³. Karena itu pemilu bukan hanya untuk menentukan partai yang berkuasa secara sah, namun jauh lebih penting dari adalah sebagai bukti bahwa demokrasi yang berjalan dengan stabil, dimana terjadi pergantian partai-partai politik yang berkuasa.

Pemilu legislatif adalah pemilu yang bertujuan untuk memilih partai politik (sebagai persyaratan pemilu presiden) dan anggotanya untuk dicalonkan menjadi anggota DPR, DPRD, dan DPD. Pada tahun 2004 pertama kali dilaksanakan pemilu legislatif secara langsung namun berdasarkan mekanisme nomor urut. Namun pada pemilu legislatif 2009 terjadi perbedaan yakni memakai mekanisme suara terbanyak berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 22-24/PUU-VI/2008 tentang perkara permohonan pengujian UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif dan Putusan MK adalah suara terbanyak.³⁴ Putusan MK ini menganut sistem proporsional terbuka (proporsional open half list system) tak terbatas, yakni pemenang pemilu legislatif ditentukan oleh suara terbanyak, bukan lagi nomor urut. Suara terbanyak menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Suara terbanyak yang berasal dari rakyat merupakan esensi dalam sistem demokrasi. Dengan sistem ini rakyat akan merasa terwakili dan kedaulatannya tersalurkan .

³³ Seymour Martin Lipset, *Political Man : Basis Sosial Tentang Politik*, (Pustaka Pelajar. Yogyakarta.1960) hal. 1

³⁴ Jangan pernah kembali ke nomor urut. <http://dprd.kaltimprov.go.id/berita/510/jangan-pernah-kembali-ke-nomor-urut.html> diakses tanggal 10 februari 2012

Walaupun sebenarnya, penggunaan mekanisme “suara terbanyak” dalam pemilihan umum adalah merupakan cara terbaik dan memenuhi asas demokrasi untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan kehendak masyarakat pemilih, akan tetapi apabila mekanisme tersebut tidak diatur secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu peraturan (dalam hal ini undang-undang) hal tersebut justru akan menimbulkan dampak yang negatif. Tanpa adanya peraturan yang menyeluruh dan terpadu maka mekanisme “suara terbanyak” hanya akan digunakan sebagai alat untuk melegalkan strategi internal partai politik untuk meraih suara pemilih sebanyak mungkin dengan mengabaikan kompetensi calon dan reformasi internal partai politik yang komprehensif, serta mengabaikan tindakan afirmatif yang sudah disepakati bersama.³⁵ Penentuan calon wakil rakyat berdasarkan suara terbanyak merupakan bagian penting dalam demokrasi. Sementara itu esensi demokrasi adalah kedaulatan yang berada di tangan rakyat. Keterlibatan rakyat dalam proses perumusan kebijakan dan penentuan calon pemimpinnya merupakan hal yang harus dijunjung tinggi dan diimplementasikan.

Pemimpin atau wakil rakyat yang dipilih berdasarkan suara mayoritas rakyat akan memiliki legitimasi yang lebih kuat dibanding dengan yang memperoleh suara yang lebih sedikit. Berdasarkan hal tersebut, bagi MK, tujuan utama peletakan kedaulatan rakyat sebagai prinsip dasar konstitusi adalah menempatkannya sedemikian rupa sehingga penghargaan dan penilaian hak suara pemilih yang membentuk wujud kedaulatan rakyat, tidak merupakan masalah yang tunduk pada perubahan-perubahan yang timbul dari kontroversi politik di parlemen, in casu dengan jalan menempatkan kekuasaan partai politik untuk mengubah pilihan rakyat menjadi pilihan pengurus partai

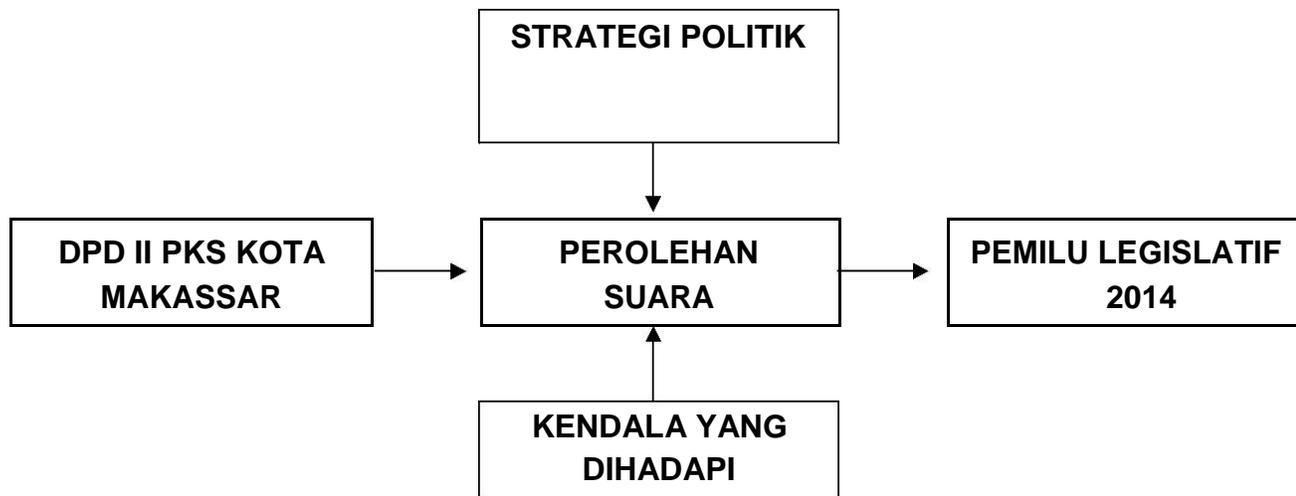
³⁵ Dissenting opinion Maria Farida Indrati dalam Putusan MK Nomor 22-24/PUUVI/ 2008, hlm 113.

melalui nomor urut. Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi menyatakan, dengan diberikan hak kepada rakyat secara langsung untuk memilih dan menentukan pilihannya terhadap calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dengan suara terbanyak, di samping memberikan kemudahan kepada pemilih dalam menentukan pilihannya, juga lebih adil tidak hanya bagi calon anggota DPR/DPRD, tetapi juga untuk masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, baik masyarakat yang bergabung sebagai anggota partai politik maupun masyarakat yang tidak bergabung sebagai anggota partai politik peserta Pemilu, karena kemenangan seseorang calon untuk terpilih tidak lagi digantungkan kepada partai politik peserta Pemilu, tetapi sampai sejauh mana besarnya dukungan suara rakyat yang diberikan kepada calon tersebut.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam proses demokrasi aspirasi rakyat disalurkan melalui mekanisme pemilu untuk memilih wakilnya di parlemen. Partai Politik dipandang sebagai sebuah lembaga yang formal yang memiliki fungsi utama yaitu mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Partai politik dijadikan kendaraan politik guna menampung aspirasi rakyat.

Partai Keadilan Sejahtera adalah partai massa yang berbasis Islam. Dalam merebut simpati dan dukungan Masyarakat Kota Makassar, Partai Keadilan Sejahtera harus memiliki strategi politik sehingga dapat bersaing di pemilu legislatif 2014.



BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam bab ini yang akan dibahas ada lima aspek yaitu: Lokasi Penelitian, Tipe Penelitian dan Dasar Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisa Data. Kelima hal tersebut akan diuraikan lebih lanjut.

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kota Makassar dengan fokus penelitian DPD II Partai Keadilan Sejahtera Kota Makassar. Partai Keadilan Sejahtera adalah partai berbasis Islam yang memiliki basis massa yang besar serta memiliki pola rekrutmen dan strategi politik yang baik. Ini terbukti dimana pada pemilihan umum legislatif 2014 Partai Keadilan Sejahtera mampu bersaing di DPRD Kota Makassar.

B. Tipe Penelitian dan Dasar Penelitian

Dasar pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif memiliki beberapa prespektif teori yang dapat mendukung penganalisaan yang lebih mendalam terhadap gejala yang terjadi, Dikarenakan kajiannya adalah fenomena masyarakat yang selalu mengalami perubahan (dinamis), yang sulit diukur dengan menggunakan angka-angka maka penelitian ini membutuhkan analisa yang lebih mendalam dari sekedar penelitian kuantitatif yang sangat bergantung pada kuantifikasi data. Penelitian ini mencoba memahami apa yang dipikirkan oleh masyarakat terhadap suatu fenomena.

Tipe penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian diarahkan untuk menggambarkan fakta dengan argument yang tepat. Penelitian dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta. Namun demikian, dalam perkembangannya selain menjelaskan tentang situasi atau kejadian yang sudah berlangsung sebuah penelitian deskriptif juga dirancang untuk membuat komparasi maupun untuk mengetahui hubungan atas satu variabel kepada variabel lain.

C. Sumber Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan data yang menurut penulis sesuai dengan objek penelitian dan memberikan gambaran tentang objek penelitian adapun sumber data yang digunakan yaitu:

a. Data Primer

Dalam penelitian peneliti membutuhkan data untuk membuktikan fakta dilapangan. Data yang diperoleh melalui lapangan atau daerah penelitian dari hasil wawancara mendalam dengan informan dan observasi langsung. Peneliti turun langsung ke DPD II Partai Keadilan Sejahtera Kota Makassar untuk mengumpulkan data dalam berbagai bentuk, seperti rekaman hasil wawancara dan foto kegiatan di lapangan. Dari proses wawancara dengan berbagai sumber peneliti mendapatkan data-data seperti, data-data kepengurusan Partai Keadilan Sejahtera serta strategi politik yang digunakan Partai Keadilan Sejahtera dalam mobilisasi pemilih pada pemilu legislatif 2014 di Kota Makassar.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian peneliti juga melakukan telaah pustaka, dimana peneliti mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya berupa buku, jurnal, koran mengenai Partai Keadilan Sejahtera dan strategi politik partai dalam pemilu serta sumber informasi lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu:

a. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara. Wawancara merupakan alat re-checking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) agar wawancara tetap berada pada fokus penelitian, meski tidak menutup kemungkinan terdapat pertanyaan-pertanyaan berlanjut. Informan yang dipilih adalah informan yang benar paham dan mengetahui permasalahan yang dimaksud. Informan yang akan penulis wawancarai untuk pengumpulan data ini adalah pengurus DPD II Partai Keadilan Sejahtera Kota Makassar dan Anggota DPRD terpilih dari DPD II Partai Keadilan Sejahtera Kota

Makassar. Pemilihan informan dapat berkembang dan berubah sesuai dengan kebutuhan penelitian dalam memperoleh data yang akurat. Penelitian ini berakhir ketika peneliti sudah merasa data yang didapat sudah cukup untuk untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

b. Dokumen/Arsip

Metode atau teknik dokumenter adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti. Metode dokumenter ini merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari sumber non-manusia. Dokumen berguna karena dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian. Dokumen dan arsip mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan fokus penelitian merupakan salah satu sumber data yang paling penting dalam penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah dokumen tertulis, gambar/foto, atau film audio-visual, data statistik, laporan penelitian sebelumnya, tulisan-tulisan ilmiah tentang Partai Keadilan Sejahtera serta strategi politik dalam pemilu..

E. Teknik Analisa

Proses analisa data dilakukan pada waktu bersamaan dengan proses pengumpulan data berlangsung secara terus menerus. Analisa data dilakukan melalui tiga alur, yakni : (1) reduksi data, (2) sajian data, dan (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi hasil akhir.

1. Reduksi Data

Pada tahap ini dilakukan proses penyeleksian, pemfokusan, penyederhanaan pengabstraksian data dari field note dan transkrip hasil wawancara. Proses ini berlangsung sepanjang penelitian dilakukan dengan membuat singkatan, kategorisasi,

memusatkan tema, menentukan batas-batas permasalahan dan menulis memo. Proses reduksi ini berlangsung terus sampai laporan akhir penelitian selesai ditulis. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan. Pada tahap ini, setelah mendapatkan data dari hasil wawancara yang berupa rekaman MP3, field note, dan pengamatan lainnya, penulis langsung melakukan transfer data kedalam sebuah tulisan yang lebih teratur dan sistematis. Sebagai upaya meminimalisasi reduksi data karena keterbatasan ingatan. Selanjutnya penulis melakukan pengkategorisasian data menurut kebutuhan penelitian. Hal ini dilakukan untuk membantu penulis dalam menganalisa data dan memasukannya kedalam bab pembahasan pada penulisan hasil penelitian.

2. Sajian Data

Sajian data adalah suatu susunan informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan. Dengan melihat sajian data, penulis dapat lebih memahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisis atau pun tindakan lain berdasarkan pemahaman tersebut. Sajian data diperoleh dari hasil interpretasi, usaha memahami, dan analisis data secara mendalam terhadap data yang telah direduksi dengan cara kategorisasi. Sajian data yang baik dan jelas sistematikanya akan banyak membantu. Sajian data dapat meliputi deskripsi, matriks, gambar/sketsa dan tabel. Kesemuanya itu dirancang guna merakit secara teratur supaya mudah dilihat dan dimengerti dalam bentuk yang baik.

3. Penarikan Kesimpulan

Dari awal pengumpulan data, peneliti sudah harus memahami apa arti dari berbagai hal yang ditemui dengan mulai melakukan pencatatan pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi, alur sebab-akibat dan berbagai proposisi. Hal itu akan diverifikasi dengan temuan-temuan data selanjutnya dan akhirnya sampai pada penarikan kesimpulan akhir.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI

A. Sejarah Singkat Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah partai yang merupakan lanjutan dari Partai Keadilan (PK) yang tidak lolos electoral threshold pada pemilu tahun 1999. PK didirikan dalam sebuah konferensi pers di Aula Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta pada tanggal 20 Juli 1998. Presiden (ketua) partai ini adalah Nurmahmudi Isma'il. Setelah dinyatakan lolos verifikasi Partai Keadilan (PK) pertama kali ikut dalam pemilu tahun 1999 dan meraih 1,4 juta suara. Akibat UU Pemilu Nomor 3 Tahun 1999 tentang syarat berlakunya batas minimum keikutsertaan parpol pada pemilu selanjutnya (electoral threshold) yaitu 2%, maka PK harus merubah namanya untuk dapat ikut kembali di Pemilu berikutnya. Pada tanggal 9 Jumadil Ula 1423H atau bertepatan dengan hari Sabtu, tanggal 20 April tahun 2002, PKS didirikan di Jakarta, dengan bergabungnya PK dan PKS maka secara otomatis semua hak milik PK menjadi milik PKS, termasuk anggota dewan dan para kadernya.

Pada pemilu tahun 2004 PKS memperoleh suara sebesar 8.325.020 atau sekitar 7,34% dari jumlah total suara dan mendapatkan 45 kursi di DPR dari total 550 kursi.

³⁶Sedangkan pada pemilu tahun 2009 lalu, PKS kembali berhasil mendapatkan 10% atau 57 kursi di DPR dan memperoleh suara sebanyak 8.206.955 atau sekitar 7,9%³⁷ dengan hasil tersebut PKS menjadi satu-satunya partai yang berbasis Islam yang memiliki perolehan suara meningkat setiap pemilunya.

³⁶ *kpu.go.id* : berdasarkan hasil pemilu tahun 2004

³⁷ *kpu.go.id* : berdasarkan hasil pemilu tahun 2009

B. Visi dan Misi Partai Keadilan Sejahtera

Visi Indonesia yang dicita-citakan Partai Keadilan Sejahtera adalah:

“Terwujudnya Masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat”.³⁸

Masyarakat Madani adalah masyarakat berperadaban tinggi dan maju yang berbasiskan pada: nilai-nilai, norma, hukum, moral yang ditopang oleh keimanan; menghormati pluralitas; bersikap terbuka dan demokratis; dan bergotong-royong menjaga kedaulatan Negara. Pengertian genuin dari masyarakat madani itu perlu dipadukan dengan konteks masyarakat Indonesia di masa kini yang merealisasikan Ukhuwwah Islamiyyah (ikatan keislaman), Ukhuwwah (kemanusiaan), dalam bingkai NKRI.

Adil adalah kondisi dimana entitas dan kualitas kehidupan baik pembangunan politik, ekonomi, hukum, dan sosial-budaya ditempatkan secara proporsional dalam ukuran yang pas dan seimbang, tidak melewati batas. Itulah sikap moderat, suatu keseimbangan yang terhindar dari jebakan dua kutub ekstrem: mengurangi dan melebihi (ifrath dan tafrith).

Sejahtera secara standar berarti aman dan makmur. Aman adalah situasi kemanusiaan yang terbebas dari rasa takut, secara psikis sejahtera, sedangkan makmur adalah situasi kemanusiaan yang terbebas dari rasa lapar, secara fisik sejahtera. . Firman Allah Swt pada surah An-Nahl 16:112 menegaskan,

“Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk)-nya mengingkari nikmat-nikmat Allah; karena itu, Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat.”

³⁸ <http://www.pks.or.id/content/visi-dan-misi>. (diakses 22/10/2014)

Bermartabat menuntut bangsa Indonesia untuk menempatkan dirinya sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Bangsa yang bermartabat adalah bangsa yang mampu menampilkan dirinya, baik dalam aspek sosial, politik, ekonomi, maupun budaya secara elegan sehingga memunculkan penghormatan dan kekaguman dari bangsa lain. Martabat muncul dari akhlak dan budi pekerti yang baik, mentalitas, etos kerja dan akhirnya bermuara pada produktivitas dan kreativitas. Kreativitas bangsa yang tinggi dapat mewujudkan dalam karya-karya adiluhung dalam berbagai bidang yang tak ternilai. Dari sana muncul rasa bangga pada diri sendiri dan penghormatan dari bangsa lain. Martabat memunculkan rasa percaya diri yang memungkinkan kita berdiri sama tegak, dan tidak didikte oleh bangsa lain.

Adapun Misi yang diemban oleh Partai Keadilan Sejahtera adalah:³⁹

1. Mempelopori reformasi sistem politik, pemerintahan dan birokrasi, peradilan, dan militer untuk berkomitmen terhadap penguatan demokrasi. Mendorong penyelenggaraan sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan fungsi dan wewenang setiap lembaga agar terjadi proses saling mengawasi. Menumbuhkan kepemimpinan yang kuat, yang mempunyai kemampuan membangun solidaritas masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, yang memiliki keunggulan moral, kepribadian, dan intelektualitas. Melanjutkan reformasi birokrasi dan lembaga peradilan dengan memperbaiki sistem rekrutmen dan pemberian sanksi-penghargaan, serta penataan jumlah pegawai negeri dan memfokuskannya pada posisi fungsional, untuk membangun birokrasi yang bersih, kredibel, dan efisien. Penegakan hukum yang diawali

³⁹ K.H. Hilmi Aminuddin. 2008. Memperjuangkan masyarakat Madani: Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (hal 203)

dengan membersihkan aparat penegaknya dari perilaku bermasalah dan koruptif. Mewujudkan kemandirian dan pemberdayaan industry pertahanan nasional. Mengembangkan otonomi daerah yang terkendali serta berorientasi pada semangat keadilan dan proporsionalitas melalui musyawarah dalam lembaga lembaga kenegaraan di tingkat pusat, provinsi dan daerah. Menegaskan kembali sikap bebas dan aktif dalam mengupayakan stabilitas kawasan dan perdamaian dunia berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. Menggalang solidaritas dunia demi mendukung bangsabangsa yang tertindas dalam merebut kemerdekaannya.

2. Mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui strategi pemerataan pendapatan, pertumbuhan bernilai tambah tinggi, dan pembangunan berkelanjutan, yang dilaksanakan melalui langkah-langkah utama berupa pelipatgandaan produktifitas sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan; peningkatan dayaasaing industri nasional dgn pendalaman struktur & upgrading kemampuan teknologi; dan pembangunan sektor-sektor yang menjadi sumber pertumbuhan baru berbasis resources & knowledge. Semua itu dilaksanakan di atas landasan (filosofi) ekonomi egaliter yang akan menjamin kesetaraan atau valuasi yang sederajat antara (pemilik) modal dan (pelaku) usaha, dan menjamin pembatasan tindakan spekulasi, monopoli, dan segala bentuk kriminalitas ekonomi yang dilakukan oleh penguasa modal dan sumber-sumber ekonomi lain untuk menjamin terciptanya kesetaraan bagi seluruh pelaku usaha.

3. Menuju pendidikan yang berkeadilan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Membangun sistem pendidikan nasional yang terpadu, komprehensif dan bermutu untuk menumbuhkan SDM yang berdaya saing tinggi serta guru yang professional dan sejahtera. Menuju sehat paripurna untuk semua kelompok warga, dengan visi sehat badan, mental spiritual, dan sosial sehingga dapat beribadah kepada Allah SWT untuk membangun bangsa dan negara; dengan cara mengoptimalkan anggaran kesehatan dan seluruh potensi untuk mendukung pelayanan kesehatan berkualitas. Mengembangkan seni dan budaya yang bersifat etis dan religius sebagai faktor penentu dalam membentuk karakter bangsa yang tangguh, disiplin kuat, etos kerja kokoh, serta daya inovasi dan kreativitas tinggi.

Terciptanya masyarakat sejahtera, melalui pemberdayaan masyarakat yang dapat mawadahi dan membantu proses pembangunan berkelanjutan.

C. Jenjang Keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera

Partai Keadilan Sejahtera adalah partai kader, dimana inti dari kekuatan partai ini berasal dari para kader-kadernya. Sesuai dengan AD-ART PKS Bab III pasal 8 yaitu, setiap warga Negara Indonesia dapat menjadi anggota partai sesuai dengan peraturan perundang undangan republik Indonesia yang berlaku.

⁴⁰ Sistem kaderisasi pada PKS berjenjang sesuai dengan tingkat kualitas dan loyalitas kadernya, adapun tingkatannya adalah :

1. Kader Pemula, yaitu mereka yang mengajukan permohonan untuk menjadi anggota partai dan terdaftar dalam keanggotaan partai dan ter Catat oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKS setelah lulus dalam training orientasi partai tingkat pertama.
2. Kader Muda, yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh DPC dan telah lulus pada pelatihan kepartaian tingkat dasar pertama.
3. Kader Madya, yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh DPC dan telah lulus pada pelatihan kepartaian tingkat dasar kedua.
4. Kader Dewasa, yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh DPC dan telah lulus pada pelatihan kepartaian tingkat lanjutan.
5. Kader Ahli, yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan telah lulus pada pelatihan kepartaian tingkat tinggi.
6. Kader Purna, yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh DPP dan telah lulus pada pelatihan Kepartaian tingkat ahli, dan
7. Kader Kehormatan, yaitu mereka yang berjasa dalam perjuangan partai dan dikukuhkan oleh Majelis Pertimbangan Partai. Jenjang keanggotaan kader ini merupakan jenjang kaderisasi para anggota Partai Keadilan Sejahtera. Jika telah

⁴⁰ 35 AD-ART Partai Keadilan Sejahtera. Bab III pasal 8.

memenuhi kualitas dan syarat-syarat yang telah ditetapkan, maka jenjang keanggotaannya pun dapat ditingkatkan.

D. Struktur Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS kota Makassar

Adapun Susunan Dewan Pengurus Daerah PKS kota Makassar periode 2012 – 2015 adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan
Hasan Hamido. S.Pd	Ketua Umum
Tumaruddin S.Si. Apt	Wakil Ketua Umum
Mudzakkir Ali Djamil ST	Sekretaris Umum
Edi, ST	Wakil Sekretaris Umum I
Mustain Ruddin A.Md	Wakil Sekretaris Umum II
Munawir	Wakil Sekretaris III
Hamsah, ST	Bendahara Umum

Sumber PKS Makassar

Bidang-Bidang

1. Bidang Pembinaan Cabang Dakwah I (Kec. Makassar, Ujung Pandang Rapoccini) : **Awaluddin Arsyad A.Md**
2. Bidang Pembinaan Cabang Dakwah II (Kec. Tamalate, Mamajang, Mariso) :
Tumaruddin
3. Bidang Pembinaan Cabang Dakwah III (Kec. Panakukang, Manggala) : **Hamzah HT**
4. Bidang Pembinaan Cabang Dakwah IV (Kec. Tallo, Bontoala, Wajo, Ujung Tanah) : **Zainuddin**
5. Bidang Pembinaan Cabang Dakwah V (Kec. Tamalanrea, Biringkanaya) :
Sutikno Kasim A.Md
6. Bidang Kaderisasi : **Drs Ruangsah Irwan Waji**

7. Bidang Pembangunan Keumatan : **H.M Iqbal**

8. Bidang Kepanduan dan Olahraga : **Wahyuuddin**



BAB V

HASIL PENELITIAN

Politik selalu ada pertarungan karena dalam setiap kekuasaan pasti selalu ada pihak penentang dan pihak pendukung sehingga kehadiran pertempuran untuk mengakhiri perebutan kuasa dan pengaruh merupakan kunci utama. Strategi politik adalah sarana untuk mewujudkan cita-cita politik. Dalam konteks pertarungan politik untuk memperebutkan sebuah jabatan, maka strategi yang matang di bidang pemilihan gubernur memegang peranan yang sangat penting karena tanpa adanya perencanaan strategi, tidak mungkin kemenangan akan diraih. Pada dasarnya strategi politik adalah strategi kampanye politik untuk membentuk serangkaian makna politis yang terbentuk dalam pikiran para pemilih menjadi orientasi perilaku yang akan mengarahkan pemilih untuk memilih partai politik atau konstestan tertentu. Makna inilah yang menjadi output penting strategi politik yang menentukan pihak, pihak mana yang akan dicoblos para pemilih.

Partai keadilan sejahtera adalah partai kader yang berideologi islam, bahkan bisa dikatakan bahwa PKS adalah satu-satunya partai kader murni yang ada di indonesia, dimana kadernya yang duduk di bangku DPR maupun DPRD merupakan kader asli binaan PKS yang telah melalui proses panjang dalam jenjang kaderisasi PKS, tidak heran jika kekuatan utama PKS berada pada pergerakan kadernya yang militant. Sebagai partai islam yang juga partai dakwah, PKS menjadikan moralitas dalam kehidupan bermasyarakat sebagai program utama partai.

Mengetahui strategi PKS pada pemilu anggota DPRD di kota Makassar pada tahun 2014, terlebih dahulu kita harus mengetahui bagaimana kekuatan dari PKS dan seperti apa strategi politik yang dilakukan PKS dalam pemilu tahun 2014, hal ini menjadi penting karena kekuatan dan strategi PKS inilah yang menentukan peluang PKS pada pemilu tahun 2014 di kota Makassar.

Strategi politik yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera untuk mendapat kursi pada pemilu legislatif 2014 di Kota Makassar

Dalam rangka merebut hati dari masyarakat setiap partai politik diharuskan untuk bekerja semaksimal mungkin untuk memanfaatkan kekuatan-kekuatan yang mereka miliki tidak terkecuali PKS. Sebagai partai kader PKS tentunya mengharapkan kerja keras dari seluruh kadernya untuk dapat memenangkan pemilu sesuai target yang telah ditetapkan. Hal ini di pertegas oleh ketua DPD PKS Kota Makassar Hasan Hamido S.Pd, M.Si : Yang menjadi Kekuatan PKS pada pemilu legislatif adalah :

“yang pertama infrastruktur Partai, terus yang kedua supporting seluruh kader-kadernya, untuk ukuran Makassar itu cukup untuk bisa mendapatkan target”⁴¹

Sebagai salah satu partai kader terbesar di Indonesia, loyalitas dan militansi kader PKS tidak perlu di ragukan lagi, bahkan loyalitas dan militansi kader inilah yang akan menjadi kekuatan inti PKS dalam menghadapi setiap pemilu. Militansi dan loyalitas yang diperlihatkan oleh kader PKS tidak terlepas dari sistem kaderisasi partai yang sistematis dan terstruktur. Setiap jenjang kader PKS dalam pengkaderan inilah yang akan membentuk pribadi kader PKS menjadi loyal dan militant terhadap perjuangan partai.

⁴¹ Wawancara dengan ketua DPD PKS kota Makassar pada tanggal 22/10/2014

PKS sebagai partai islam dan partai dakwah, PKS memiliki sistem pengkaderan yang berbasis tarbiyah. Hal ini diungkapkan langsung oleh ketua umum DPD PKS kota Makassar dan Ketua DPC PKS biringkanaya.

“Sistem Pengkaderan PKS itu, ada dalam bentuk kegiatan kegiatan tarbiyah, disinilah mereka itu dikader, disinilah mereka diberdayakan dan disinilah mereka dipahamkan terkait keterlibatan mereka di PKS”⁴²

Dari pernyataan diatas, membenarkan bahwa inti dari pengkaderan PKS ada dalam sistem tarbiyah. Kata terbiyah memiliki tiga akar kata, yaitu *raba-yarbu* (bertambah dan berkembang), *rabiya-yarba* (tumbuh dengan alami), dan *rabbayarubbu* (memperbaiki dan meningkatkan). Dari tiga arti bahasa di atas dapat disimpulkan bahwa tarbiyah adalah proses perubahan manusia menuju kondisi yang lebih baik, sehingga dapat terwujud pada dirinya *syaksiyah islamiyah mutakamilah* (kepribadian islam yang sempurna).⁴³

Sistem tarbiyah adalah sistem kaderisasi inti dari PKS, dalam tarbiyah inilah kader-kader PKS dibina dan dibentuk menjadi sosok kader yang militant dan loyal kepada partai, hal ini dikarenakan kader-kader PKS di didik dengan menggunakan kurikulum yang diterbitkan oleh PKS sendiri. Langkah awal yang dilakukan PKS dalam sistem kaderisasinya adalah pembinaan pribadi, pembinaan pribadi kader PKS mampu memberikan keterampilan-keterampilan pribadi kader maupun interaksi antara kader. Pembinaan pribadi kader sangat penting dalam proses dakwah PKS, sebab PKS memandang bahwa proses dakwah parlemen hanya bisa dilakukan dengan Pribadi yang bersih dan shaleh. Jika jiwa pribadi bersih dan shaleh maka secara otomatis dakwah yang dilakukan akan berjalan dengan lancar.

⁴²Wawancara dengan ketua DPD PKS kota Makassar

⁴³Buletin Ar-Rahmah. Yayasan Ar-Rahmah Sulawesi. Edisi : 782

Langkah selanjutnya setelah melakukan pembinaan pribadi kader adalah pembinaan keluarga, ini juga sangat penting dan saling berhubungan sebab dengan membentuk pribadi yang bersih dan shaleh menjadikan kunci dalam membentuk keluarga yang shaleh, dan dari keluarga shaleh yang terbentuk inilah yang akan membentuk masyarakat yang islami. Selain sistem kaderisasi, ideologi partai juga merupakan salah satu faktor yang menjadikan kader PKS loyal dan militant terhadap perjuangan partai. Ideologi islam yang dianut PKS dapat menjadi pilar-pilar dan dasar perjuangan para kader PKS.

Islam secara eksternal adalah bentuk *diferensiasi* dan sekaligus *positioning* PKS sebagai entitas politik nasional berhadapan dengan entitas politik lainnya.⁴⁴ Disisi lain dengan menjadikan islam sebagai aqidah, asas dan basis moral, maka PKS berkeyakinan dan ingin menegaskan, bahwa secara internal subyektif aktivitas politik adalah ibadah, yang apabila bertujuan untuk kemaslahatan ummat, didasarkan pada niat yang ikhlas untuk mencari ridho Allah SWT, dan dilaksanakan dengan cara-cara yang baik dan terpuji, maka aktifitas politik menjadi ibadah yang bernilai Amal Shalih⁴⁵. jadi tidak heran jika kader-kader PKS berjuang dengan sekuat tenaga dalam memperjuangkan partainya, sebab mereka meyakini apa yang mereka lakukan dan perjuangankan adalah semata-mata untuk kemaslahatan ummat, dan merupakan ibadah kepada Allah SWT.

Selain militansi dan loyalitas kadernya, salah satu kekuatan PKS lainnya adalah infrastruktur partai. infrastruktur yang dimaksud adalah kepengurusan partai sampai pada tingkat kecamatan dan kelurahan-kelurahan yaitu DPC (Dewan Pengurus

⁴⁴ H. Hilmi Aminuddin. 2008. Memperjuangkan masyarakat Madani: Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (hal 33) ⁴⁵ ibid

Cabang) PKS yang tersebar di setiap kecamatan dan kelurahan di kota Makassar. Infrastruktur inilah yang akan bergerak dan berjuang untuk melakukan konsolidasi dari bawah yaitu dari tingkat kecamatan dan kelurahan-kelurahan, peran infrastruktur ini juga tidak bisa dipandang sebelah mata, sebab infrastruktur inilah yang menjadi poros perjuangan dan menjadi nadi PKS dalam upaya mencapai target pada pemilu.

Bahkan infrastruktur partai ini menentukan hasil suara yang akan diperoleh PKS. Kekompakan infrastruktur PKS inilah yang akan menjadi cerminan kekuatan PKS, semakin kompak dan solid infrastruktur PKS, maka akan semakin besar kekuatan PKS, dalam hal ini kekompakan para pengurus PKS telah mereka buktikan dengan seringnya mereka melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka sosialisasi pemilu 2014, dan acara yang dilakukan pengurus PKS tersebut selalu ramai, hal ini membuktikan bahwa infrastruktur infrastruktur PKS benar benar kompak dan solid dalam menghadapi pemilu tahun 2014.

Selain mengandalkan kader dan infrastruktur, PKS juga memiliki kekuatan lainnya yaitu dari kalangan eksternal partai yang terbentuk menjelang pemilu walikota Makassar, hal ini disebutkan oleh Asdar, ketua DPC PKS biringkanaya. Yang menjadi kekuatan PKS pada pemilu 2014 adalah:

*“kekuatan kader, ada juga dari eksternal pilwali yang terbentuk sekarang, yang jika terus dipertahankan maka, akan memperoleh hasil yang signifikan”.*⁴⁶

Ada beberapa pihak eksternal PKS yang bergerak pada pemilu walikota Makassar tahun 2013, pada pilwalkot Makassar PKS mengusung pasangan Tamsil Linrung dan Das'ad Latief, pada saat itu ada banyak pihak eksternal partai atau tim sukses yang terbentuk diantaranya adalah HIPKI, Solata Community, Tim Mawar,

⁴⁶ Wawancara dengan ketua DPC PKS biringkanaya,

Sahabat Tamsil, Buruh Se-Kota Makassar, Makassar Kreatif, 86 Community, Latimojong Tim, dan Petarung (Persaudaraan Tamsil Linrung) dan Dukungan lainnya dari berbagai macam ormas seperti KAMMI, HMI, Wahdah Islamiyah, Kerukunan Masyarakat Pinrang, KOMPAK Pangkep, Dukungan Akademisi Seperti Prof. Halide, Prof. Mansur Ramli, Pengusaha Besar seperti H. Nasrun, Aksa Mahmud, dll.

Kekuatan dari pihak eksternal ini tentu akan sangat membantu PKS dalam mencapai target yang telah disepakati melalui musyawarah daerah, sesuai dengan hasil musyawarah daerah target PKS pada pemilu 2014 di kota Makassar adalah menjadi pemenang kedua. Dengan adanya target tersebut maka akan menjadi acuan bagi para kader dan relawan-relawan PKS untuk berjuang secara militan dan berusaha untuk mencapai target tersebut.

Sebagai partai islam dan partai Dakwah, selain eksternal yang kuat PKS identik dengan kadernya yang muda dan militant, hal ini dikarenakan PKS aktif melakukan tarbiyah di lingkungan kampus-kampus, di lingkungan kampus inilah PKS berhasil menjaring para kadernya yang rata-rata masih berusia muda yang notabene adalah mahasiswa. KAMMI sering disebut-sebut sebagai salah satu organisasi sayap PKS, dan bukan menjadi rahasia lagi jika banyak kader PKS adalah alumni atau berasal dari KAMMI, bahkan dalam bukunya yang berjudul *Dilema PKS: Suara dan Syariah* Burhanuddin Muhtadi menuliskan bahwa Berdasarkan survei internal antarkader KAMMI, mayoritas aktivis setuju mendirikan partai.

Akhirnya, pada 20 Juli 1998, berdirilah Partai Keadilan (sekarang Partai Keadilan Sejahtera).⁴⁷ Meski sejumlah tokoh KAMMI berkontribusi penting dalam pembentukan PK, organisasi KAMMI tetap berdiri terpisah, tanpa hubungan formal dengan partai. PK

⁴⁷ Burhanuddin Muhtadi. *Dilema PKS: Suara dan Syariah*

dan KAMMI hanya mengakui mereka mempunyai hubungan ideology, budaya, dan Sosial. Meski hubungannya tidak Formal, namun ikatan antara PKS dan KAMMI sangat kental, hal ini dikarenakan KAMMI sering disebut-sebut sebagai sayap PKS, hal ini dibuktikan dengan banyaknya aktivis KAMMI yang merintis karier politiknya di PKS, apalagi beberapa alumni KAMMI memegang posisi kunci dalam struktur partai di PKS. KAMMI dalam konstitusinya tidak pernah menjadi *sayap* partai manapun, itu independensi yang cukup jelas dalam konstitusi KAMMI. Namun KAMMI secara lembaga tidak melarang kadernya untuk aktif dan menjadi bagian dari salah satu partai politik.

Selain kekuatan yang dimiliki, strategi juga merupakan factor pendukung lahirnya peluang pada pemilu, Strategi politik adalah hal yang mutlak dan harus dimiliki setiap partai politik dalam upaya untuk memenangkan pemilu. Sama halnya dengan senjata dalam menghadapi sebuah pertarungan, maka strategi juga sangat penting untuk mendukung dan membuka peluang dalam memenangkan sebuah pertarungan. Tanpa adanya strategi yang baik, maka peluang untuk memenangkan sebuah pertarungan juga akan semakin kecil.

Pada pemilu 2014 di kota Makassar, dapat dipastikan bahwa setiap partai politik memiliki strategi masing-masing untuk menari simpati dari masyarakat, semakin banyak simpati yang mereka terima dari masyarakat, maka semakin besar pula peluang untuk memenangkan pemilu. Pemilu tahun 2014 dijadikan ajang pertunjukan dan persaingan strategi setiap partai politik dalam usaha untuk mencapai tujuan partainya. Ada beberapa strategi politik yang dilakukan PKS pada pemilu tahun 2014, diantaranya

adalah mendekatkan diri kepada masyarakat, dan ideologi islam yang dimiliki sebagai dasar perjuangan partai.

3 PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)			
			
NO URUT	NAMA CALON	JENIS KELAKSIAN	REKOMENDASI PEMILIH TINGGAL CALON
DAERAH PEMILIHAN : MAKASSAR 1			
1	MUSYAFFIKAH AL-DIYAH, ST	P	RAFFOERI
2	ELIYAHUDDIN, ST	P	RAFFOERI
3	MUSYAFFIKAH AL-DIYAH, ST	P	RAFFOERI
4	DR. HU SAPAH	P	MAKASSAR
5	SYAFRUDDIN, SE	L	UDUNG PANDANG
6	ANDI FACHRI, ST	L	PALAKKANG
7	ANDI MAHER NAGRA, SE	L	PALAKKANG
8	MUHAMMAD SYAMSUDDIN, ST	P	RAFFOERI
9	MUHAMMAD, ST	L	MAKASSAR
33 % Keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya			
DAERAH PEMILIHAN : MAKASSAR 2			
1	IRWAN, ST	L	TAYALANGA
2	RAMADAN, ST	P	UDUNG TANA
3	DR. RUSLI, ST	L	WABO
4	SULAIMAN, ST	L	TALLO
5	HJ. RAHMATI	P	TALLO
6	HUSNY HANZALI, SH	L	TALLO
7	DR. M. RUSLI IRANSYAH	L	TALLO
8	DR. AISYAH NAID	P	BERTOLA
9	KASIM, ST	L	TALLO
10	AFNANDI, SE	L	TALLO
20 % Keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya			
DAERAH PEMILIHAN : MAKASSAR 3			
1	HASAN HANID, S.Pd, N.S	L	BIRINGKANAYA
2	U. MUHAMMAD YODAN	L	BIRINGKANAYA
3	SPINA BINTI, S.Ag	P	TAYALANGA
4	ABDI HADI BAKRIM BAKR, S.S, Pd	L	BIRINGKANAYA
5	IBRUS	L	BIRINGKANAYA
6	HAHTAH HUSAIN, SE	P	TAYALANGA
7	EMAWATI, SE	P	TAYALANGA
8	H. RANI, BA	L	BIRINGKANAYA
9	WALIJAL, SE	P	BIRINGKANAYA
10	FALSAH, BA	P	TAYALANGA
50 % Keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya			
DAERAH PEMILIHAN : MAKASSAR 4			
1	HJ. RIHMANAH, PwM, Wati	L	BIRINGKANAYA
2	HJ. SETI SALMA, Lc	P	MAROGALA
3	MUR ANIN, S.Sos	L	MAROGALA
4	HJ. HASINDA, S.Sos, N.S	P	MAROGALA
5	ABDI SALIM, SH	L	MAROGALA
6	DESIANTO, A.MK	L	MAROGALA
7	HJ. MIFTY RAHMATI, S.Pd	P	PALAKKANG
8	DR. SYAFRUDDIN	L	PALAKKANG
9	DR. AMIRUDDIN MANSAN	L	PALAKKANG
10	DIJHAKKARA, S.Sos	L	PALAKKANG
20 % Keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya			
DAERAH PEMILIHAN : MAKASSAR 5			
1	YENI SALMA, S.Pd	P	MARISO
2	LMA S. CASIM	L	TAYALANGA
3	Dr. SOLIHAN HS	L	TAYALANGA
4	PAPUL DIN, A.Md, TH	L	TAYALANGA
5	AGUSYI SYAMSUDDIN, ST	P	TAYALANGA
6	ANDI RAHMAT ALI, S.Pd, Wati, ST	L	RAFFOERI
7	ABDIKALIM, SH	L	RAFFOERI
8	DR. H. SYAFRUDDIN YASIN, S.Ag, M.M	L	MARISO
9	MUHAMMAD AL-SIKRI, N.Kes	P	TAYALANGA
10	RIHMANAH, Wati, S.Sos	P	TAYALANGA
11	DR. RAHMAT	L	TAYALANGA
38 % Keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya			
Jumlah Bakal Calon untuk seluruh Daerah Pemilihan sebanyak — 50 (Lima Puluh) Orang			

1. Pelayanan Masyarakat

PKS sebagai partai dakwahpun memiliki strategi yang digunakan pada pemilu 2014 di kota Makassar. salah satu strategi yang digunakan PKS adalah pelayanan terhadap masyarakat, seperti yang diutarakan ketua DPD PKS kota Makassar berikut.

“strategi Politik PKS lebih berorientasi pada pelayanan, membangun komunikasi, aktif berkomunikasi dengan masyarakat, dan kita juga siap menerima atau dalam hal ini, PKS siap membuktikan diri sebagai partai yang siap mendengar apa masukan-masukan masyarakat”.

Untuk mendukung strategi politik PKS, tentunya dibutuhkan kerja keras dari setiap infrastruktur partai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, kecamatan maupun tingkat kelurahan. Hal inipun didukung oleh ketua DPC PKS biringkanaya sebagai berikut.

*“yang jelas kita sudah melaunching terbuka dengan jargon sekarang **cinta, kerja, dan harmoni**, itulah yang akan menjadi strategi PKS dan tidak lagi terfokus pada masjid”*

Dari pernyataan diatas mejelaskan bahwa dengan jargon baru PKS yang bertajuk cinta, kerja, dan harmoni inilah yang akan menjadi simbol strategi PKS dalam pada pemilu 2014. Dalam pernyataan diatas juga menjelaskan bahwa PKS sebagai partai islam mampu bertransformasi sebagai partai yang terbuka dan merekrut kader dari kalangan non-muslim sekalipun.

Dengan mengandalkan strategi politik dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat, pelayanan tersebut berupa program-program yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Seperti yang diungkapkan ketua DPD PKS kota Makassar.

“programnya itu adalah pelayanan, dengan berbagai macam jenis kegiatan, pelayanannya itu bisa berorientasi pada pelayanan sosial, pelayanan pendidikan, maupun pelayanan dalam sisi keagamaan”

Dari pernyataan ketua DPD PKS di atas dapat diketahui bahwa pelayanan yang dilakukan PKS bermacam-macam, mulai dari pelayanan social, pendidikan dan dalam sisi keagamaan. Pada pelayanan sosial, PKS telah membuktikannya dengan seringnya kader-kader PKS turun dan ikut membantu para korban bencana alam dengan cara mendirikan posko posko bantuan di daerah daerah yang terkena bencana, hal ini mereka lakukan untuk membuktikan bahwa PKS merupakan partai pro rakyat dan peduli terhadap rakyat. Begitupun pada pelayanan dalam sisi keagamaan, sebagai partai dakwah tentu saja PKS tidak akan pernah kehabisan stok ustadz atau penceramah-pencerah, dalam kader- kader PKS turun langsung untuk melakukan ceramah-ceramah kepada mesyarakat. Selain ceramah-ceramah, kader perempuan PKS juga aktif dalam melakukan tarbiyah atau pengajian-pengajian dalam masyarakat.

Pelayanan-pelayan yang dilakukan PKS semata-mata untuk bertujuan untuk meyakinkan masyarakat bahwa PKS adalah benarbenar partai yang dapat menjadi tempat aspirasi mereka dan menjadi partai yang benar-benar bekerja untuk rakyat. Oleh karena itu PKS bekerja untuk mendapatkan followers bukan voters dan mencari kader bukan memilih.

2. Ideologi Islam

Sebagai partai yang berideologi islam, PKS juga bisa menjadikan ideology islamnya sebagai salah satu kekuatan menghadapi pemilu tahun 2014. PKS sebagai entitas politik nasional, secara subyektif berjuang dengan dasar aqidah, asas, dan moralitas islam untuk mencapai tujuan terwujudnya masyarakat madani yang adil, sejahtera dan bermartabat, bermartabat, bersama-sama dengan entitas politik lainnya secara kompetitif berjuang untuk mencapai cita-cita nasional.

PKS sangat terkenal dengan ideologi islamnya yang kental, bahkan PKS mengaku bahwa peran ideologi islamnya sangat besar dalam pemilu 2014 di kota Makassar. Pengaruh ideology PKS pada pemilu 2014 sangat kuat, karena kita melihat bahwa mayoritas penduduk kota Makassar adalah orang-orang agamais, ini menjadi daya dorong tersendiri untuk mampu mengambil suara besar dari umat islam itu.

Dari penjelasan diatas dapat kita lihat bagaimana ideology yang dianut PKS dapat menjadi kekuatan dan daya dorong dalam upaya mencapai target pada pemilu 2014 di kota Makassar. seperti diketahui bahwa ideology inilah yang terus dipertahankan dan di perjuangkan PKS sekaligus menjadi kekuatan dalam setiap gerakan-gerakan yang dilakukan PKS. Hal ini tidak lepas dari anggapan para kader PKS yang menganggap Politik adalah sebuah ibadah, yang dimana jika dilakukan dengan baik dan benar demi kemaslahatan ummat, maka akan beriali ibadah di sisi Allah *Subhanahu Watala*. Hal ini menjadi cukup menarik mengingat dewasa ini masyarakat sering menganggap politik itu kotor.

Ideologi Islam sebagai strategi PKS, akan menjadi boomerang balik jika tidak dibarengi dengan pembuktian yang baik dan benar kepada masyarakat. PKS harus berhati-hati, sebab bisa saja ideology PKS dapat menjadi ancaman pada pemilu, sebab kita lihat menjelang pemilu 2014, terjadi beberapa kasus yang dapat menjadikan partai-partai islam terpuruk, termasuk PKS yang sedang diguncang oleh kasus korupsi suap import daging sapi yang dilakukan oleh mantan presidennya Luthfi Hassan ishaq.

Hal ini tentu membawa dampak buruk bagi citra PKS, saat masyarakat banyak melihat kasus tersebut yang sempat menjadi *headline* di media-media, dampaknya tentu akan membuat masyarakat trauma bahkan terjadi krisis kepercayaan terhadap

partai islam. Tetapi, jika PKS dapat melalui itu semua, bukan tidak mungkin PKS akan merubah ancama tersebut menjadi sebuah kekuatan untuk memenangkan pemilu.

Pemilu tahun 2014 di kota Makassar merupakan ajang pembuktian bagi setiap partai politik yang bertarung pada pemilu, hal ini dikarenakan keinginan partai politik untuk menguasai kota Makassar dan menjadikan ibukota provinsi Sulawesi selatan ini sebagai basis daerah pendukungnya. Namun, untuk memenangkan pemilu di kota Makassar tentu saja tidak mudah, selain harus menghadapi pesaing-pesaing yang kuat sesama partai politik, parpol juga akan dihadapkan dengan tantangan-tantangan lainnya baik masalah eksternal, maupun masalah internal partai tersebut.

PKS sebagai salah satu partai peserta pemilu, PKS juga tidak terlepas dari masalah-masalah yang akan menjadi tantangannya menjelang pemilu. Seperti yang dipaparkan ketua DPD PKS melalui wawancara tentang tantangan yang akan dihadapi PKS pada pemilu di kota Makassar sebagai berikut :

“Hambatan itu pertama dari sisi modal, modal dalam bentuk finansial, yang kedua pragmatisme masyarakat, siapa saja bukan hanya PKS, partai apa saja kalau datang ingin menawarkan sesuatu pada masyarakat, masyarakat itu sudah terpola bahwa anda mau memberi kami apa?, dan pertanyaan memberi itu bukan sebuah ide atau gagasan yang mereka minta, tapi yang mereka minta kebanyakan adalah dalam bentuk material seperti uang, sembako dst. Ini yang menjadi tantangan besar kita,...”

Dari pernyataan ketua DPD PKS di atas, dapat kita lihat bahwa tantangan utama PKS pada pemilu 2014 adalah masalah prilaku pemilih di kota Makassar dan kendala finansial.

Sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, dapat dikatakan bahwa prilaku politik masyarakat yang ada di kota Makassar sudah cenderung rasional, namun, tidak dapat di pungkiri juga bahwa masih banyak di antaranya yang masi bersifat pragmatis.

Prilaku inilah yang akan menjadi tantangan bukan hanya untuk PKS, namun setiap partai politik akan menghadapi hal ini, dimana masyarakat tidak semua menggunakan hak pilihnya secara rasional dengan melihat program-program yang ditawarkan partai, namun melihat dari sisi materialnya, yaitu seberapa besar uang atau sembako yang diberikan untuknya.

Perilaku memilih inilah yang menjadi masalah sekaligus tantangan bagi PKS dan partai lainnya dalam upaya mendidik masyarakat agar tidak lagi berorientasi pada sisi materi tersebut, sebab salah satu fungsi partai politik adalah melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Prilaku politik dalam masyarakat memang selalu menjadi tantangan tersendiri bagi setiap peserta pemilu, seperti yang telah diungkapkan ketua DPD PKS di atas bahwa, masyarakat saat ini memang lebih menginginkan hal-hal yang bersifat pragmatis dan sementara, misalnya meminta sembako dan uang kepada peserta pemilu, hal ini tentu akan mencederai tujuan awal pemilu yaitu mensejahterakan rakyat melalui program-program yang ditawarkan parpol peserta pemilu.

Tantangan inilah yang kemudian dihadapi PKS pada pemilu 2014 di kota Makassar, PKS dan partai politik lainnya diharapkan mampu memberikan solusi terhadap setiap masalah pada masyarakat berupa ide dan gagasan dan memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat agar praktek *money politic* dapat dihilangkan. Seperti yang dikatakan ketua DPD PKS kota Makassar.

“...jika pendidikan politik sudah berjalan ditengah-tengah masyarakat, uang itu sedikit demi sedikit pengaruhnya sudah mulai bergeser, yang dibutuhkan suatu saat nanti adalah apa ide dan gagasan sebuah partai...”

Dengan penjelasan tersebut timbul sebuah harapan agar politik kedepannya dapat berjalan dengan baik sebagaimana semestinya dan dapat terhindar dari praktek politik yang kotor seperti *money politic* dan praktek curang lainnya yang dapat merugikan masyarakat. Selain perilaku pemilih dan anggaran hal lain yang akan menjadi tantangan PKS adalah persaingan setiap partai politik peserta pemilu yang sangat ketat. Sudah dapat dipastikan bahwa pemilu tahun 2014 di Makassar adalah ajang pembuktian partai politik mana yang terkuat dan mampu untuk menguasai ibukota Provinsi Sulawesi Selatan.

Namun, untuk dapat menguasai kota Makassar sangat tidak mudah untuk dilakukan oleh setiap peserta pemilu termasuk PKS, ada banyak pesaing yang juga berhasrat untuk menguasai suara di kota Makassar, dalam hal ini tentu saja akan menjadi tantangan bagi PKS dalam upaya mencapai targetnya pada pemilu di kota Makassar, para pesaing PKS seperti partai Golkar, Demokrat, PDI-P, PAN, dan partai partai lainnya akan siap untuk bersaing.

PKS pada pemilu tahun 2009 di kota Makassar, hanya berada di urutan ke-4 di bawah Partai Golkar, Demokrat, dan PDK. PKS berhasil memperoleh 5 kursi pada pemilu tingkat DPRD kota Makassar. pada pemilu tahun 2014 peluang PKS dalam mencapai targetnya masih terbuka dengan syarat PKS harus mampu menunjukkan eksistensi dan mampu untuk bersaing dengan partai-partai lainnya. Persaingan akan terasa cukup berat bagi PKS mengingat dipastikan setiap partai politik peserta pemilu akan ikut berbenah dan menghimpun seluruh kekuatan partai yang dimilikinya dan siap untuk mencegah PKS dalam mencapai targetnya, oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa partai yang paling siap dan benar-benar kuatlah yang akan menguasai kota

Makassar. Jalan partai politik untuk dapat bersaing dalam perebutan suara pada pemilu di kota Makassar, salah satunya adalah mempersiapkan tokoh-tokoh terbaik yang dimilikinya untuk bersaing dengan tokoh partai lainnya mengingat pemilihan anggota DPRD merupakan pemilihan tokoh.

Pada persaingan tokoh ini PKS berharap mampu untuk menyaingi tokoh dari partai lain yang sudah cukup matang dan familiar di masyarakat, inilah yang menjadi tantangan PKS untuk mensosialisasikan tokoh partainya melihat bahwa beberapa partai lainnya sudah cukup matang dan berpengalaman.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel telah menetapkan 50 caleg terpilih untuk DPRD Kota Makassar periode 2014-2019. Penetapan itu melalui rapat pleno yang dilaksanakan di Gedung PKK di Jl Anggrek, Kecamatan Panakkukang, Makassar. Rapat dipimpin oleh Ketua KPU Kota Makassar Syarif Amir, didampingi tiga komisioner lainnya yakni Armin, Rahma Saiyed, dan Abdullah Manshur. Inilah daftar 50 caleg terpilih DPRD Kota Makassar yang tersebar di lima daerah pemilihan di Makassar:

Sementara untuk posisi kursi pimpinan DPRD berdasarkan jumlah perolehan kursi parpol dan jumlah perolehan suara sah parpol dalam pemilu anggota DPRD Kota Makassar tahun 2014 dimana posisi Ketua DPRD di kuasai oleh partai Golkar dengan jumlah perolehan delapan kursi dengan jumlah suara sah 85.909. Selanjutnya wakil ketua 1 diduduki Partai Demokrat dengan perolehan kursi berjumlah tujuh kursi dengan jumlah suara sahnya 86.612. Untuk jabatan wakil Ketua II milik Partai Gerindra dengan jumlah perolehan lima kursi dengan jumlah suara sah 72.238, serta jabatan Wakil

Ketua III dimiliki Partai Nasdem dengan perolehan kursi berjumlah lima kursi dengan jumlah suara sah 59.313.

PKS meyakini bahwa pembangunan merupakan hak sekaligus kewajiban masyarakat, bukan hanya negara. Karenanya pemberdayaan masyarakat, baik dalam aspek politis maupun ekonomis, akan mengantarkan rakyat pada posisi sejajar sebagai mitra pemerintah, yang duduk satu meja bersama-sama untuk mencapai situasi saling menguntungkan. PKS memandang partisipasi total masyarakat madani, pengusaha, pemerintah serta kerjasama internasional, yang merupakan lintas komponen dan aktor, adalah sebuah keniscayaan dalam mengelola pembangunan. Semua itu dilaksanakan dalam kerangka yang bersifat integral, global dan universal menuju keadilan dan kesejahteraan

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas mengenai strategi Partai Keadilan Sejahtera pada pemilu anggota DPRD di kota Makassar sesuai dengan rumusan masalah penelitian, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan penulis yaitu sebagai berikut :

Kekuatan utama PKS ada pada loyalitas dan militansi kadernya, loyalitas dan militansi kader PKS diperoleh dari sistem kaderisasi partai yang berbasis Tarbiyah. Pada sistem tarbiyah inilah kader-kader PKS dipahamkan tentang ideologi perjuangan partai yang akan diperjuangkan secara bersama-sama. Selain memiliki kader yang loyal, PKS juga memiliki infrastruktur partai, pihak eksternal dan Organisasi sayap Partai.

Strategi politik PKS pada pemilu di kota Makassar adalah mendekati diri kepada masyarakat dengan berorientasi pada pelayanan masyarakat, pelayanan yang berikan PKS berupa program dengan berbagai jenis kegiatan pelayanan, seperti pelayananan social, pendidikan, maupun pelayanan pada sisi keagamaan. Selain itu strategi lain PKS adalah dengan memaksimalkan ideologi islam yang dimiliki mengingat mayoritas warga Makassar adalah umat muslim.

Adapun yang menjadi tantangan bagi PKS pada pemiliha umum di kota Makassar adalah masih kurangnya dukungan pemerintah terhadap keberadaan partai politik mengenai masalah financial, prilaku pemilih di kota Makassar yang cenderung masih merupakan pemilih yang Pragmatis, dan persaingan partai-partai peserta pemilu yang semakin ketat di kota Makassar.

B. Saran

Selain kesimpulan yang ada di atas, penulis juga ingin memberikan beberapa saran terkait kekuatan dan strategi politik PKS pada pemilu di kota Makassar, yaitu sebagai berikut :

1. Sebagai Partai yang berideologi islam, meskipun PKS telah menyatakan untuk terbuka dalam merekrut kader dan tidak terfokus lagi pada masjid-masjid, PKS hendaknya tetap mempertahankan ideologi islam sebagai dasar yang telah diperjuangkan selama ini dan tidak mengarah pada partai pragmatis yang semata-mata hanya mengincar suara tanpa jelas arah perjuangan partainya.
2. Meskipun diakui bahwa saat ini partai-partai islam tengah terpuruk dengan banyaknya pemberitaan-pemberitaan miring yang dapat merusak citra partai-partai islam, PKS harus tetap solid dalam menghadapi masalah tersebut, dan membuktikan kepada masyarakat bahwa PKS adalah partai yang bersih dan benar-benar bekerja dan melayani masyarakat untuk kesejahteraan rakyat. Pada pemilu tahun berikutnya, PKS diharapkan mampu menjaga dan mengangkat citra partai politik di masyarakat terutama dengan partai partai islam, mengingat banyaknya kader partai islam yang terjerat kasus termasuk PKS. Tugas PKS adalah memulihkan kembali citra partai islam dengan cara bekerja dengan baik dan membuktikan kepada masyarakat bahwa PKS benar-benar partai yang bersih.

DAFTAR PUSTAKA

- Amal, Ichlasul. 1998. *Teori-Teori Mutakhir Partai*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana
- Aminuddin, K.H. Hilmi. 2008. *Memperjuangkan masyarakat Madani*. Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Bungin, H. M. Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Prenada Media Group
- Edward, Djony. 2006. *Efek Bola Salju Partai Keadilan Sejahtera*. Bandung: PT Syaamil Cipta Media
- Efriza. 2012. *Political Explore sebuah kajian ilmu politik*. Alfabeta, CV
- Hidayat, Komaruddin. 2006. *Politik Panjat Pinang : dimana peran agama?*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara
- Kantaprawira, Rusadi. 1999. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Sinar baru Algensindo
- Michael Allison, dan Jude Kaye, *Perencanaan Strategis bagi Organisasi Nirlaba* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Michels, Robert. 1984. *Partai Politik: Kecenderungan Oligarkis dalam Birokrasi*, Jakarta: Rajawali
- Muhtadi, Burhanuddin, *Dilema PKS: Suara dan Syariah*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012.
- Nico Harjanto : *Politik Kekkerabatan dan Institusionalisasi Partai Politik Di Indonesia :140 (Mandiri)*
- Rahman, Arifin. 1998. *Sistem Politik Indonesia*. Surabaya: LPM IKIP
- Rusli, Karim M. 1991. *Perjalanan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Potret Pasang Surut*. Jakarta : CV. Rajawali
- Sanit, Arbi.1995. *Sistem Politik Indonesia kestabilan, peta kekuatan politik dan pembangunan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Scholder, Peter. 2003. *Strategi Politik*. Jakarta: PT Mita Alembana Grafika.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta:PT Gramedia Widiasara Indonesia.
- Rahmat, M. Imadudun. 2008. *Ideologi Politik PKS Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen*. Yogyakarta: PT LkiS Pelangi Aksara Yogyakarta

Toni Andrianus Pito S.Ip | Efriza S.Ip | Kemal Fasyah S.Ip. 2006. *Mengenal Teori-teori Politik*. Bandung: Penerbit Nuansa

Winarto, Budi. 2008. *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*. Yogyakarta: MedPress